



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI IX DPR RI
DENGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BKKBN RI**

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Rabu, 19 Februari 2025
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Acara : 1. Membahas program 100 hari lengkap dengan indikator yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan visi pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas;
2. Membahas laporan perkembangan pelaksanaan rekomendasi Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI atas Percepatan Penurunan *Stunting*.
Waktu : Pukul 10.31 s.d. 13.04 WIB
Ketua Rapat : Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A. (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-PKB)
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI)
Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:**
22 orang Anggota hadir dari 43 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

I. PIMPINAN:

1. Felly Estelita Runtuwene, S.E. (Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. NASDEM)
2. M. Yahya Zaini, S.H. (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GOLKAR)
3. drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GERINDRA)
4. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A. (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-PKB)

II. ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

4 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Indah Kurnia, S.E., M.M.
2. Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., M.B.A.
3. Eko Kurnia Ningsih
4. H. Ahmad Safei, S.H., M.H

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-P. GOLKAR)**

2 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M.
2. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA (F-P. GERINDRA)**

2 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M.
2. Obon Tabroni

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(F-P. NASDEM)**

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn.
2. Nurhadi

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F-PKB)**

1 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Asep Romy Romaya

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
(F-PKS)**

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si
2. Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si
3. H. Alifudin, S.E., M.M

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)**

1 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
(F-P. DEMOKRAT)**

3 orang Anggota dari 3 Anggota

1. dr. Hj. Cellica Nurrachadiana
2. Dra. Lucy Kurniasari
3. Tutik Kusuma Wardhani, S.E., M.M.,
M.Kes.

B. UNDANGAN

1. Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd. (Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN)
2. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos. (Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN)
3. Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D. (Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama)
4. Dr. Bonivasisus Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng. (Deputi Bidang Pengendalian Penduduk)
5. Nopian Andusti, S.E., M.T. (Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga)
6. Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd. (Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat)
7. Dr. Drs. Wahidin, M.Kes. (Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi)
8. Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., MA. (Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)
9. Sunarto, S.E., M.M. (Plh. Inspektur Utama)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Yang saya hormati seluruh jajaran dari Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga,
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX,
Bapak-Ibu yang saya hormati.**

Hari ini, rapat tercatat masih ada dari 6 fraksi dari 8 fraksi. Jadi, sebenarnya belum kuorum juga. Saya izin untuk menskors 5 menit, ya, sebelum kita mulai. Begitu, ya?

(RAPAT DISKORS)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Rapat saya cabut. Mohon maaf, skors saya cabut

(SKORS RAPAT DICABUT)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Menteri Kependudukan beserta seluruh jajarannya,
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX,
Yang saya hormati Bapak-Ibu yang hari ini hadir pada Rapat Kerja Komisi IX
DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN**

Sebelum kita mulai acara kita, rapat kita pada hari ini, mari bersama kita berdoa semoga rapat kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan.

(BERDOA)

Aamiin yaa rabbal'amin.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Rapat ini kita mulai pukul 10.31. Kita sepakati selesai pukul berapa? 12.00, ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Rapat ini kita sepakati terbuka ya, Bapak-Ibu, ya.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.31 WIB)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Ada dua agenda rapat kita pada hari ini:

1. Membahas program 100 hari lengkap dengan indikator yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan visi pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas;
2. Membahas laporan perkembangan pelaksanaan rekomendasi Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI atas Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk itu, saya persilakan kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk bisa memberikan pemaparan, mungkin 15 menit – 20 menit cukup, Pak Menteri? Silakan 15 menit sampai 20 menit untuk bisa memberikan pemaparan. Waktu dan tempat dipersilakan.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Siap, terima kasih atas izin Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

**Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi IX, terima kasih, Bu Felly,
Kemudian Pimpinan Komisi, yang memimpin sidang, izin, terima kasih Ibu Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh,
Kemudian Pimpinan, Pak Wakil Ketua, Bapak Yahya Zaini, terima kasih,
Yang saya hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi IX DPR RI yang izin tidak saya sebut satu-persatu,**

Terima kasih. Pada kesempatan ini, izin, saya akan memaparkan beberapa hal yang berkenaan dengan materi raker bersama Komisi IX pada pagi hari ini ada dua hal atau dua *item* yang nanti saya presentasikan, saya laporkan, sekaligus barangkali menjadi catatan-catatan, yang selama ini bagian dari materi Raker dengan Komisi IX.

Next.

Bapak-Ibu sekalian,

Dalam hal ini saya akan memaparkan 3 *outline*. Yang pertama, berkenaan dengan 100 hari kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Walaupun tentu, secara diksi memang kita tidak ada diksi 100 hari, tetapi tentu saya apresiasi dan saya akan mencoba nanti memaparkan dalam kinerja 100 hari, dalam Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kedua tentang laporan perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Baru, barangkali ini bagian yang program prioritas, yang ini nanti isinya adalah kerja 100 hari. Kira-kira begitu, Ibu Pimpinan.

Next, izin,

**Bapak-Ibu sekalian,
Pimpinan yang saya hormati,**

Ini program-program yang sudah kita coba kerjakan dalam satu hari ke belakang sampai sekarang. Mulai dari awal *rebranding*, karena memang kita adalah kementerian transformasi dari badan menjadi kementerian, kita *rebranding*-nya mulai dari, mohon maaf, yang kita sebut dengan perubahan logo. Logo kita ganti maknanya. Kemudian coba dalam hal ini kita juga menyesuaikan SOTK baru, bagian dari penyesuaian dari Perpres 180, 181. Dari *rebranding* ini, mungkin juga simbol logo secara otomatis bertahap berganti, karena memang tahapannya ada yang belum sempurna. Kita kemarin minta waktu sekitar 6 bulan untuk menyesuaikan apa yang harus kita kerjakan berkenaan dengan *rebranding*.

Yang kedua, revitalisasi kegiatan prioritas. Dalam hal ini adalah mendukung pemanfaatan bonus demografi yang prinsipnya ada program-program dalam *quick win* kita, yakni Tamasya, Genteng, dan Gate. Nanti di *slide* berikutnya akan ada data-data yang berkenaan dengan apa yang sudah kita kerjakan dalam 100 hari ke belakang.

Kemudian yang ketiga, revitalisasi konsep pengendalian penduduk. *Outcome*-nya itu nanti akan melahirkan akses jangkauan pelayanan untuk KB di wilayah yang tertinggal, terpencil, dan terbatas, keterbatasan, terpinggir, saya ulangi.

Kemudian ada *refocusing* kelompok sasaran program. Ini bagian dari yang, ya, untuk menyesuaikan, khususnya yang berkenaan program-program yang ini menjadi prioritas dari Kemendukbangga. Nanti secara datanya, izin, Pimpinan, akan kita lihatkan di *slide* berikutnya, ini gambaran umum saja.

Kemudian juga revitalisasi program dan kegiatan yang berbasis IT. Nanti *outcome*-nya SuperApps berbasis AI.

Kemudian penguatan kerja sama dengan kemitraan. Ini nanti salah satu kegiatannya adalah MoU dan PKS bersama MBG, mohon maaf, BGN/Badan Gizi Nasional. Kebetulan kita kerja sama dengan BGN khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Itu nanti untuk makan bergizi gratis, distribusi data dan monitoring diserahkan kepada Kementerian Kemendukbangga, khusus ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD, karena PAUD akan diselesaikan oleh Dikdasmen.

Kemudian yang terakhir, penguatan kegiatan pembangunan keluarga sesuai siklus hidup nanti ada program lansia berdaya. Datanya *slide* berikutnya.

Next.

Bapak-Ibu,

Untuk laporan perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, perlu saya laporkan, ini amanah dari sebelumnya ada beberapa hal yang berkenaan dengan perkembangan strategi nasional percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* tahun 2025 sampai 2029. Ada 4 poin dalam hal ini, perlu saya laporkan kepada Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama tentang penekanan pada aspek pencegahan *stunting* baru, bukan pada penanganan anak yang sudah *stunting* dan penyederhanaan indikator yang digunakan dengan fokus pada indikator strategis. Ini nanti ada gambaran yang selama ini dianggap belum presisi, belum disiplin, karena banyaknya K/L yang terlibat, nanti ada evaluasinya, bisa dilihat di *slide* berikutnya, sehingga datanya dalam hal ini nanti capaiannya kurang bagus.

Nomor dua, penambahan pilar Stranas PPS/Percepatan Penurunan *Stuning* dengan pilar peningkatan kapasitas, sehingga pilar Stranas P3S menjadi 6 pilar. Ini bagian dari hasil rapat hasil koordinasi dari berbagai K/L yang berkenaan dengan PPS.

Nomor tiga, penekanan pada pentingnya intervensi berbasis wilayah dengan memperhatikan masalah yang dihadapi oleh masing-masing wilayah. Yang memang ini bagian dari siapa bertugas apa, termasuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Kemudian empat, penguatan kelembagaan TPPS di pusat dan daerah. Izin, Pimpinan, Perpres 72, Desember 2024 sudah habis. Sekarang masih dalam proses tahapan untuk perpanjangan, perlu saya laporkan, masih di Bappenas, untuk prosesnya dari perpanjangan Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Next.

Bapak-Ibu,

Ini capaian indikator intervensi spesifik ada dua, 1 intervensi spesifik, 1 lagi intervensi sensitif. Kalau dilihat dari angka, kita harus jujur, Bapak-Ibu Pimpinan, capaiannya hampir semuanya sesuai targetnya enggak tercapai. Tadi ada beberapa yang berkenaan dengan kewenangan kementerian kita, tapi juga ada kewenangan dari kementerian lain, seperti Kementerian Kesehatan. Poin pertama, poin kedua misalnya itu hubungannya dengan Kementerian Kesehatan dan data ini juga diambil dari Kementerian Kesehatan.

Saya ulangi, salah satu evaluasi dari capaian indikator intervensi spesifik ini enggak tercapai memang banyaknya indikator yang dititipkan dari semua K/L. Saya ulangi, banyaknya indikator yang dititipkan dari semua K/L, 22 K/L itu menitipkan indikator semua, itu menjadi *problem*, sehingga capaiannya belum terpenuhi, walaupun nanti juga akan kita lihat hasil SSGI tahun 2024 yang belum selesai, karena masih di tangan Kementerian Kesehatan sampai sekarang belum dikeluarkan

Next.

Termasuk intervensi sensitif sama, antara target dengan capaiannya hampir rata-rata kurang terpenuhi. Tadi salah satu *problem* dan hasil evaluasi adalah kurang disiplin dan kurang presisi, sekaligus banyak indikator dan banyaknya K/L yang menanganinya, sehingga ini perlu penyederhanaan. Termasuk, saya laporkan, Bapak-Ibu, bahwa capaian ini juga capaian yang belum hasil 2024, paling cepat baru triwulan III/2024. Secara keseluruhan belum dikeluarkan dari Menteri Kesehatan. Jadi, ini capaian-capaian yang lama dan memang kalau melihat angkanya, semuanya belum tercapai. Ini perlu jujur kita sampaikan, walaupun memang secara umum belum dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan.

Next.

Bapak-Ibu,

Ini sebagai program prioritas yang menjawab poin pertama tentang kerja 100 hari, salah satunya dengan kita melakukan *quick win* Kemendukbangga ada 5 *quick* yang kita sudah kerjakan, tapi semuanya tentu *step by step*, ada yang masih kerangka, ada yang sudah dikerjakan. Perlu saya laporkan kepada Ibu Pimpinan, Bapak Pimpinan, dan seluruh Anggota DPR Komisi IX.

Yang pertama, gerakan orang tua asuh cegah *stunting*, ini bagian dari inovasi lama, tapi saya coba formulasikan dengan tidak melibatkan APBN. *Pure* murni, ini adalah gerakan orang tua asuh yang dalam hal ini mekanismenya diatur

melalui keputusan Menteri, supaya tidak ada masalah di kemudian hari, siapa, kepada siapa, lokusnya di mana, indikator KRS-nya seperti apa, ini semua *by name by data*, berdasarkan KRS yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kemendukbangga. Artinya bahwa gerakan orang tua asuh cegah *stunting* ini adalah upaya dan ikhtiar kita untuk mencegah, supaya tidak terjadi *stunting* dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, ada pemerintah, ada swasta, ada perorangan, ada perguruan tinggi, dengan empat menu yang kita siapkan bagi orang tua asuh. Nanti ada datanya, saya laporkan ke Bapak-Ibu sekalian.

Kemudian yang kedua, taman asuh sayang anak. Ini semangatnya adalah bagian dari *reasoning* adanya 20,9% masyarakat Indonesia mengalami *fatherless* atau kehilangan sosok ayah. Ini hasil UNICEF yang ini menjadi *reasoning*, yang poin pentingnya adalah nanti akan menjawab sebagian dari *problem* bonus demografi, karena kalau ini dibiarkan yang namanya bonus demografi akan terganggu kalau ini enggak diperhatikan berdasarkan data dan tentu *reasoning* yang coba kita elaborasi untuk menjadi jalan keluar ataupun salah satu solusi untuk menjawab *problem* tentang *fatherless*.

Termasuk gerakan ayah teladan, mohon maaf saya ulangi, selain *fatherless* yang nomor dua ini, hubungannya dengan apa yang kita sebut fenomena, nanti bisa minta masukan dari Bapak-Ibu, tentang *childfree*, 71.000 perempuan Indonesia hari ini menurut berita adalah *childfree*, pengen menikah, tapi tidak pengen punya anak. Salah satunya ada kecemasan, ada dinamika pikiran, sehingga salah satu jawabannya adalah nanti adalah *daycare*. Ini kita sudah bekerja sama dengan enam kementerian untuk mencoba mencari jalan keluar yang barangkali salah satunya adalah sebab ketakutan, sebab ekonomi, sebab budaya, dan sebab pergeseran kebahagiaan. Nanti tentu saya minta masukan dari Bapak-Ibu sekalian.

Kemudian gerakan ayah teladan, ini poin ketiga *quick win* kita, Ibu Pimpinan, ini saya ulangi bagian dari menjawab *fatherless* tadi nanti ada menu-menunya, ini singkat-singkat saja.

Kemudian yang poin 4, SuperApps berbasis AI, Bapak-Ibu sekalian, ini *reasoning*-nya adalah apa yang menjadi *problem* remaja yang luar biasa dipengaruhi oleh algoritma medsos, AI, yang sangat berpengaruh dalam pikiran, yang akhirnya menggeser kepada perilaku dan ini mengganggu untuk bonus demografi ke depan. Kalau *reasoning*-nya kira-kira sekarang nanti bisa didiskusikan, khususnya ada generasi yang namanya *Strawberry Generation*, *Hello Kitty Generation* yang mungkin ini menjadi masalah kalau enggak diperhatikan dan itu sangat dipengaruhi oleh dunia medsos, yang dalam hal ini anak-anak milenial lebih asik dengan dunia ini, maka kita mencoba memberikan jawaban menciptakan layanan SuperApps berbasis AI sebagai pembanding, sebagai pemberian salah satu pilihan.

Yang terakhir, Bapak-Ibu, Lansia Berdaya. Lansia Berdaya ini sama semangatnya adalah menjawab bonus demografi, karena lumayan *aging population* kita ini 11,7%, diasumsikan tahun 2045 itu bisa 20%. Artinya, umur 60 sampai 65 yang dianggap masih bonus demografi di antara umur 14 sampai 65 tahun, berarti masih ada usia 5 tahun yang dianggap bonus demografi untuk kita siapkan semacam sesuatu, yang nanti bisa berdaya di luar nanti, di atas bonus demografi. Artinya, karena angka harapan hidup kita ini sekarang naik, sekitar 74,3 masih ada kira-kira asumsinya di atas 65 tahun ini masih banyak juga perlu negara hadir, perlu pemerintah hadir, menyiapkan aktivitas, mengisi kesepian lansia, karena apapun alasannya, beliau dari warga negara Indonesia yang mesti kita pikirkan bagian dari siklus kehidupan dan tanggung jawab dari kementerian kita

Itu, Bapak-Ibu sekalian, yang kita kerjakan bentuknya, datanya, kira-kira seperti. Nanti *ending*-nya semua program ini akan dalam satu lokus dan fokus di dalam konsep kampung pembangunan keluarga yang kita sebut dengan Kampung KB yang dulu, tapi coba kita formulasikan dari keluarga berkualitas menjadi pembangunan keluarga mengikuti dari SOTK dan nomenklatur tentang pembangunan keluarga.

Next.

Ini data-datanya, Bapak/Ibu sekalian, untuk Genteng yang sudah kita kerjakan.

Next.

Target kita 1 juta tapi nanti bisa kita lihat, per hari ini sudah ada 32.203 penerima program Genteng (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*). Ini sudah dibagi berbagai provinsi/kabupaten dan masing-masing kaper melaporkan *by name, by address, by* nama orang tua asuhnya, nama yang diasuh, termasuk menunya. Menunya itu ada empat, Bapak-Ibu, ada nutrisi, ada air bersih, ada rumah layak huni, dan edukasi. Kemudian orang tua asuhnya kita sudah 20.021 ini bisa dari media, bisa dari perorangan, bisa dari swasta, bisa dari perguruan tinggi, bisa dari BUMN, BUMD, yang didampingi oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga) dari program ini, secara teknis, mendampingi dan mengawasi penyalurannya dari orang tua asuh langsung ke penerima manfaat atau anak asuh di berbagai kabupaten/kota, terutama datanya diambil dari KRS (Keluarga Risiko *Stunting*).

Next.

Ini contoh saja, Bapak-Ibu, perlu saya laporkan kepada Bapak-Ibu. Ternyata setelah ada *treatment*, lumayan ada contoh yang dari Sumatra Barat itu kita ambil salah satu contoh aja, mulai dari berat badan, tinggi badan, termasuk dari DIY, dari Bali, dari Papua. Ini contoh anak asuh yang diasuh oleh orang tua

asuh, ya berat badan rata-rata oke, tapi belum normal. Secara ukur normalnya belum normal, tapi ada kenaikan karena memang baru 2 bulan perjalanan ini, selama kita *launching* bulan Desember, tanggal 5 Desember, kalau enggak salah

Next.

Ini contoh saja, salah satu contoh yang rumah layak huni, salah satu yang memang tidak punya sanitasi. Kita buat dan ini ada di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel. Salah satunya kebetulan pas *launching*-nya di Kabupaten Karawang dan salah satu nama dari KRS (Keluarga Risiko *Stunting*) yang disebabkan berdasarkan indikatornya enggak punya sanitasi dan lainnya, kemudian kita bangun dari orang tua asuh.

Next.

Bapak-Ibu,

Ini data yang, izin, Pimpinan, izin, Bapak-Ibu Anggota, ini data yang dari Tamasya/Taman Asuh Sayang Anak. Konsepnya baru pada tahap bikin *frame*, surat edaran sudah, keputusan menteri sudah, penandatanganannya dengan enam kementerian masih berjalan, tinggal satu menteri yang belum, Menteri Sosial, karena ini enam menteri yang berkaitan dengan program sinergi antar kementerian. Yang poin pentingnya salah satunya adalah menciptakan *daycare*, yang nanti ada tiga *item*, baik oleh pemerintah, kemudian oleh swasta, maupun oleh korporasi. Secara teknis, di kita, selain dalam institusi kelembagaan yang berbentuk *daycare*, tapi juga ada yang lain, dalam bentuk menu sertifikasi. Yang artinya, nanti bagi taman asuh sayang anak itu menciptakan orang tua yang kira-kira mengerti, termasuk Tamasya di kelas orang tua hebat, kemudian konvensi hak anak dan pengasuhan positif dan lain sebagainya. Yang di situ adalah edukasi bagi orang tua yang berkenaan dengan orang tua yang punya anak bagian dari program Tamasya

Next.

Sedikit-sedikit saja, ini potensinya, Bapak-Ibu, berdasarkan persebaran potensi Tamasya di Indonesia, potensinya 4.120 Tamasya, yang hari ini ada yang berbasis pemerintah, ada yang berbasis perusahaan, ada yang berbasis masyarakat. Ada yang memang lagi dalam proses, *insyaAllah*, mohon doanya aja. Ini bagian dari jawaban, walaupun belum sempurna, tapi ada harapan tinggi, terutama kaum millenial atau pasangan muda, yang pengen bekerja suami-istri, salah satunya membutuhkan *daycare* sebagai salah satu jawaban di beberapa masyarakat perkotaan.

Next.

Bapak-Ibu,

Untuk yang ketiga, ini data untuk GATE (Gerakan Ayah Teladan), yang berdasarkan *reasoning*-nya tadi, nanti *outcome*-nya ada empat menu. Harapannya ada layanan konseling, ada konsorsium, ada Desa Ayah Teladan, yang nanti masuk dalam Kampung Pembangunan Keluarga, yang dulu disebut Kampung KB, sehingga nanti terukur dari seluruh Indonesia mulai dari program Genteng, Tamasya, GATE, Lansia Berdaya, SuperApps, semuanya berbasis di desa yang sudah ditentukan untuk mempermudah sinergi. Walaupun tidak menutup kemungkinan, akan ada desa-desa yang lain selama itu nanti sesuai dengan apa yang sudah menjadi konsep ataupun *frame* dari kegiatan ini, khususnya tentang program-program dari kementerian. Kemudian juga ada sekolah bersama ayah, ya. Program-program ini sederhana, tapi semuanya berpengaruh terhadap siklus kehidupan, khususnya menyiapkan generasi emas dan menjawab bonus demografi.

Next.

Bapak-Ibu,

Ini capaian dari GATE-nya per hari ini yang sudah kita kerjakan, data-datanya. Saya ulangi, belum sempurna, tapi kita ikhtiari terus, karena memang nanti penyempurnaannya pada tingkat Kampung Pembangunan Keluarga yang nanti harus jelas siapa, bersama siapa, di mana, dan terukur indikatornya jelas. *Insyallah* nanti juga ini panduannya sudah jalan, tinggal memang terus disosialisasikan, saya ulangi disosialisasikan di masing-masing kaper, berkenaan dengan nanti kerjanya di lini lapangan. Selama 3 bulan terakhir kira-kira sudah lumayan yang berkenaan dengan konsultasi tentang ayah teladan, khususnya di *website* ada 14.000, kemudian di satyagatra 62.000, kemudian beberapa kita turun lapangan yang berkenaan dengan edukasi pentingnya pengasuhan ayah.

Next.

Lansia Berdaya, ini tadi sudah saya sampaikan, bagian dari jawaban sederhana tapi negara mesti hadir, khususnya berkenaan dengan, satu, menjawab bonus demografi khususnya umur 60 sampai 65. Umumnya di atas 65 yang masih sehat, tentu negara mesti hadir dan bagian dari tugas kementerian kita untuk siklus kehidupan yang lansia. Dalam hal ini, perlu saya laporkan kepada Bapak-Ibu sekalian, nanti ini program melanjutkan dan menyempurnakan. Saya ulangi, ini program melanjutkan dan menyempurnakan, salah satu institusi kelembagaan *outcome*-nya adalah ada sekolah lansia, tapi lebih kita sempurnakan yang dulu ada S1, S2, S3, kita sempurnakan khususnya untuk pemberdayaan umur 60 sampai 65 tahun, sebagai bagian umur yang masih bonus demografi dan *aging population*.

Next.

Ini yang sudah kita kerjakan, Bapak-Ibu sekalian, yang tadi saya sampaikan, laporkan di awal dari kerja 100 hari. Khusus lansia, ini yang sudah kita kerjakan dari penyempurnaan dan kelanjutan dari program lama yang sudah ada yang kita formulasikan adalah khusus berdayanya dan menjawab *aging population* kita yang 11,7%.

Next.

Saya kira....

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Izin, Pak.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN (Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):

Oke.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ini ada coretan, nih, di kertas kita. Tulisannya “Proses Bisnis Sidaya”, lalu dicoret menjadi “Proses Layanan Sidaya”.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN (Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Jadi catatan, ya, buat tim dari kementerian. Ini harus hati-hati sebelum di-*print out*, ya. Ini soalnya bisnis dan layanan, beda jauh, ya.

Lanjut, Pak.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ BKKBN (Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang kita maksud adalah proses layanan Sidaya, bukan bisnis. Itu kalau ada salah, saya mohon maaf. Ini bagian dari mekanisme, kira-kira gitu dan untuk program Sidaya memulainya dari mana hulunya sampai hilirnya ke mana, *outcome*-nya seperti apa, yang disebut dengan manfaat itu *outcome*. Tadi saya jelaskan tentang semangatnya adalah menjawab bonus demografi, teknisnya adalah kegiatan, kelembagaannya adalah satuan pendidikan nonformal, yang disebut dengan sekolah lansia S1, S2, S3, dengan cara-cara lansia, kurikulum lansia, dan salah satunya adalah menjawab kesepian, selain memang menjawab untuk supaya berdaya.

Next.

Bapak-Ibu,

Ini yang terakhir. Izin, Pimpinan, SuperApps berbasis AI ini, formulasinya adalah bagaimana kementerian kita mencoba membikin SuperApps berbasis AI, yang nanti untuk pelayanan konsultasi berkenaan dengan keluarga, baik isu pernikahan, pengasuhan keluarga, ekonomi keluarga, maupun psikologi keluarga. Kemudian caranya nanti mengintegrasikan aplikasi ke dalam satu platform dengan sentuhan AI dan nanti juga, ada juga 1, 2 yang berbasis avatar, untuk mempermudah edukasi. Harapan kita, nanti juga kira-kira secara kultur, coba dibedakan cara-cara edukasi. Cara-cara Jakarta mungkin akan beda dengan cara-cara lokal di berbagai tempat yang mungkin juga kulturnya berbeda, tapi pesan-pesannya sampai. Jadi, edukasinya dengan berbasis teknologi, yang asumsi kita, hampir semua masyarakat melek terhadap digital, khususnya pegang *handphone*, sehingga sosialisasi dan edukasinya salah satunya berbasis digital, tapi pendekatannya AI maupun ada 1, 2 yang avatar untuk mempermudah penjelasan tentang konsultasi maupun isu-isu yang berkenaan dengan pernikahan secara umum tentang pembangunan keluarga. Targetnya adalah sejuta generasi milenial dan milenial dan nanti basisnya adalah data informasi konseling bagi keluarga di Indonesia, salah satu bentuk layanannya.

Next.

Bapak-Ibu,

Ini *timeline*-nya dari SuperApps, mulai dari konsep rancang bangun, kemudian kompilasi dan integrasi. Ini, izin, Pimpinan, belum selesai, karena datanya baru kita masuk-masukkan, *database*-nya, mulai dari nanti juga data keluarga, data-data yang lain yang berkenaan dengan indikator-indikator yang kita masukkan dalam data tersebut, sehingga ketika mengetik untuk mencari jawaban dalam bentuk AI, bisa dijawab di AI tersebut di program kita, dengan data yang kita masukkan berdasarkan indikator riset maupun berdasarkan survei yang sudah ditetapkan dari data kementerian kita, yang nanti juga berintegrasi dengan yang lain. Sampai nanti, tentu akan ada uji cobanya, bulan Juli, sementara masih fokus untuk memasukkan data-data bulan Februari ini. Nanti *metaverse*-nya juga

insyaAllah kita ciptakan. Kemudian merancang AI-nya juga kita ciptakan. Ini butuh tahapan dan lumayan namanya, datanya, karena ini basis AI ini data, karena data ini akan menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan khususnya kaum milenial dan milenial kalau datanya salah, nanti jawabannya juga akan menyesuaikan dengan datanya

Next.

Ini tambahan laporan, Bapak-Ibu sekalian, yang sudah kita kerjakan tadi, selama 100 hari. Kita MoU dengan Prof. Dadan kalau BGN, khususnya tentang distribusi, kemudian pendataan, dan evaluasi khusus MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kalau PAUD akan ditangani oleh Dikdasmen. Kita sudah uji coba beberapa tempat kemarin di Bogor, terakhir di Kabupaten Bandung, tentu ada beberapa evaluasi yang nanti saya perlu laporkan juga kepada Bapak-Ibu dan ini memang udah oke.

Tinggal mungkin perlu pembiayaan sedikit, khusus TPK yang nanti ditugasi, untuk mendistribusikan MBG, karena tiap hari tidak mungkin ibu hamil, ibu menyusui ngumpul, atau berkumpul untuk mendapatkan MBG, beda dengan kalau satuan pendidikan sekolah tiap hari masuk sekolah. Kalau ini kan enggak mungkin masuk sekolah, maka kita *supporting*, kita *support* TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang akan mendistribusikan makanan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Masih di beberapa tempat, sambil PKS-nya kurang sedikit lagi, karena butuh pembiayaan, khususnya, mohon doanya, biar ada insentif, buat TPK, pengganti bensin untuk mendistribusikan makanan ke ibu hamil dan ibu menyusui dan balita.

Walaupun kemarin di lapangan saya laporkan sekalian kepada Ibu Pimpinan, harus dipastikan jangan sampai nanti MBG untuk ibu hamil dimakan oleh ayahnya. Itu yang, izin, kita perlu nanti masukan juga, karena beda dengan sekolah kan diawasi semua, kalau ini kan didistribusikan harus dipastikan dimakan, termasuk balita yang makan juga harus balitanya gitu. Ini sangat luar biasa menurut saya, Bapak-Ibu, khususnya di kementerian kita untuk, ya, 30% menjawab masalah asupan gizi, khusus penyebab *stunting* yang disebabkan asupan gizi. Ini saya kira agak lumayan membantu, hitungan kita 30% di luar penyebab air bersih, sanitasi, dan tentu edukasi.

Next.

Ini contoh-contoh saja, Bapak-Ibu, ada modelnya. Ada tiga model yang nanti disepakati. Satu, khusus ibu hamil, menyusui, dan balita yang menge-*drop* itu dari kader-kader pendamping, atau TPK, maupun dari pos PKB. Kemudian yang model kedua, kateringnya dari UPPKA, distribusinya dari tetap kita. Kemudian yang ketiga, diolah oleh Dashat. Kita dulu punya Dahshat/Dapur Anak Sehat Cegah *Stunting* dan sekaligus distribusikan.

Ini belum disepakati dengan BGN, tapi ini bagian dari yang sudah kita proposal saya sampaikan kepada BGN, tapi *insyaAllah* salah satu pasti dikerjakan. Yang sudah kita uji juga dan simulasi adalah kita yang model A. Kita mendistribusikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Ini tugasnya nanti TPK dan pos PKB, petugas PKB, pendamping keluarga yang selama ini menjadi petugas lini lapangan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

Next.

Saya kira itu, Bapak-Ibu sekalian, khususnya Pimpinan, laporan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dan kami sampaikan perkembangannya terutama laporan keseluruhan pelaksanaan tahun 2024. Saya mohon masukan. Tentu jauh dari sempurna, saya ikhtiari dengan kemampuan saya dan kementerian dari Kemendukbangga.

Kemudian kedua, kegiatan *quick win* Kemendukbangga akan dimaksimalkan untuk mendukung upaya pencapaian prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas SDM dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan perkembangan dalam pelaksanaannya akan kami laporkan.

Yang terakhir, mohon arahan, mohon dukungan, dari Bapak-Ibu Pimpinan, serta seluruh Anggota Komisi IX DPR RI yang terhormat agar program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Tentu, mohon masukan, mohon evaluasi, dari apa yang kita kerjakan, yang sudah, maupun yang akan. Sekali lagi, mohon dukungan, mohon evaluasi, dan mohon masukan dari Bapak-Ibu sekalian, khususnya Pimpinan dan Anggota DPR Komisi IX.

Terima kasih.

Kalau ada yang salah tutur kata yang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Menteri.

Saya mencatat banyak sekali istilah baru, Genteng, Tamasya, GATE, Sidaya. Jadi sudah, sudah. Jadi, plus ada gerakannya lagi ya, Pak. Kalau berencana itu keren, begini kan. Nanti ada Genteng, ada. Harus hafalan lagi ini nanti kalau ada gerakan baru nanti kalau sosialisasi. Terima kasih, Pak Menteri.

Selanjutnya sudah ada beberapa nama dari Anggota yang akan melakukan pendalaman. Pertama dari sebelah kiri, Bu Lucy. Persiapan, Pak Nurhadi.

Silakan, Bu Lucy.

F-P. DEMOKRAT (Dra. LUCY KURNIASARI):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Sahabat-Sahabat Komisi IX, Pak Menteri, Ibu Wakil Menteri, para Deputi dan seluruh jajaran dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia,

Saya mengapresiasi apa yang tadi Pak Menteri sudah paparkan. Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa ini program lama yang di-*upgrade*, yang diperbarui, dan kami masih ingat dulu di 2018 kita masing-masing ke dapil dengan program Kampung KB. Satu kota/kabupaten tadinya hanya berdiri satu Kampung KB. Kemudian, setiap kecamatan di dapil saya sekarang sudah berdiri 2 sampai 3 Kampung KB. Jadi, saran saya, sebaiknya program ini tetap berjalan.

Lalu, kemudian, ada juga program yang Dapur Sehat Atasi *Stunting*. Saya berharap tidak ada tumpang tindih dengan program BGN. Jadi, saya lihat di paparan Bapak sudah tidak ada, ya, Dashat.

Lalu, kemudian, tadi sudah dipaparkan terkait dengan program *quick wins*. Ini harus jelas, Pak. Jadi, indikator tiap programnya harus jelas, lalu prosedur dan monitoring evaluasinya juga harus jelas. Semoga program ini tepat sasaran dan bukan menjadi program asal Bapak senang. Kita tunggu nanti gebrakan-gebrakan berikutnya, inovasi-inovasi berikutnya dari Bapak.

Lalu, kemudian, terkait dengan prevalensi *stunting*. Tadi Bapak memaparkan bahwa seluruh provinsi tidak berhasil. Kalau kita mengacu di Perpres Nomor 72, itu targetnya 14%. Kalau di Jawa Timur sendiri, per hari ini 17,7%. Nah, yang menarik di Kota Surabaya, Pak. Surabaya ini luar biasa. Kebetulan, Surabaya adalah daerah pemilihan saya. Ada juga Bu Indah Kurnia dan Bu Arzeti, yang sama-sama dari Jawa Timur I, meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kota Surabaya inovasinya luar biasa. Hari ini

prevalensi *stunting* 1,6% untuk Kota Surabaya, luar biasa. Inovasinya juga kita lihat luar biasa program-programnya, tapi kalau dikolaborasikan dengan program terbaru yaitu *quick wins*, yang tadi Bapak paparkan, ini juga ada beberapa program yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, di antaranya adalah ada pendataan keluarga. Jadi, PK24/Pendataan Keluarga 2024, ini rasanya kalau ada penilaian, data terbaik itu di Kota Surabaya, Pak.

Lalu, kemudian, ada sekolah orang tua hebat S1, S2. Ini di semua wilayah se-Kota Surabaya ini sudah lama diterapkan, bahkan sudah lulus S1, S2. Lalu kemudian Sekolah Lansia Tangguh, Selantang namanya, Pak. Cuma ada aspirasi dari kader lansia, bahwa yang tadinya Pak Heru di sekda, zaman Pak Heru, ya, masih ada permakanan, Pak. Sekarang sudah tidak ada. Jadi, menurut para lansia, dari ibu hamil, lalu kemudian PAUD, SD, SMP, SMA, ya itu diberikan makanan bergizi gratis, bagaimana dengan lansia?

Lalu, kemudian, ada kegiatan Pos Keluarga atau Posga. Ini kegiatannya timbang badan, ukur tinggi badan, ukur perut, tensi, sasarannya balita, prasekolah, remaja, dan lansia. Nah, mungkin bisa menjadi percontohan atau *pilot project* untuk program *quick wins* yang Bapak tadi paparkan.

Yang kedua, Pak, terkait dengan pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja. Ketika kita turun, Pak, kalau Bina Keluarga Lansia terbentuk, Bina Keluarga Balita selalu ada. Yang tidak terbentuk itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Harapan saya, ini disosialisasikan, agar supaya apa? Menjadi wadah untuk para remaja. Jadi, kalau kita melihat data BPS, jumlah remaja di Indonesia ini 2023 sebanyak 64,16 juta. Sementara, Pusat Informasi Konseling Remaja berdasarkan data BKKBN baru 12.268. Nah, ini harus dicek juga, Pak, apakah 12.268 itu betul-betul terbentuk atau ini hanya data saja, tetapi di lapangan tidak terbentuk. Ini artinya masih banyak yang belum terbentuk. Padahal mereka ini yang nantinya menjadi penentu di Indonesia Emas 2045. Apakah ada kendala di lapangan sehingga Pusat Informasi Konseling Remaja ini tidak terbentuk? Saran saya, sebaiknya pembentukan Pusat Informasi Remaja dijadikan program prioritas, agar remaja punya wadah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itu, perlu dipikirkan paradigma yang tepat digunakan agar PIK Remaja benar-benar menjadi candradimuka dalam menyiapkan remaja menuju Indonesia Emas 2045.

Yang terakhir, Pak, sosialisasi terkait dengan....

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Izin. Waktu, ya, Bu.

F-P. DEMOKRAT (Dra. LUCY KURNIASARI):

Iya.

MOP, Pak. Jadi, kami ingin agar supaya, khususnya Ibu-Ibu, ya, mendukung agar supaya KB ini tidak dilakukan hanya untuk perempuan saja. Ada MOP, karena banyak ketika kita sosialisasi MOP itu dikira dikebiri, padahal tidak. Ya, itu yang perlu kita dorong, kita sosialisasikan, agar supaya para pria ini bisa ikut serta di program KB.

Demikian mungkin dari saya, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Izin mengingatkan di pojok atas ada waktu untuk kita bisa lebih efektif, mohon untuk bisa 5 menit.

Selanjutnya Pak Nurhadi. Persiapan, Bu Tutik Kusuma Wardhani.

Silakan, Pak Nurhadi.

F-P. NASDEM (NURHADI):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sehat,

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,
Pak Menteri Bu Wakil Menteri, dan seluruh jajaran,**

Salam sehat semuanya.

Pertama, kalau melihat anggaran dari Kementerian Kemendukbangga atau BKKBN ini memang tidak sebanyak dengan kementerian atau badan negara yang lain. Namun, saya sangat mengapresiasi dari program-program Bapak yang Bapak istilahkan dengan *quick win* tadi. Intinya ini kan di luar program, di luar serapan APBN kan.

Ini luar biasa, yang salah satunya yaitu program Genteng (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*). Ini sebenarnya juga linier, Pak, dengan karakter orang Indonesia ini yang suka berbagi, suka bersedekah kan begitu. Ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dari laporan World Giving Index 2024, dari *charities foundation*, Indonesia ini menduduki peringkat pertama dalam daftar negara paling dermawan sedunia, 7 tahun berturut-turut, sejak 2017. Nah, ini yang saya sampaikan linear dengan program Bapak. Namun, kami yang di lapangan ini masih belum merasa dengung ataupun gaung dari program Genteng ini, Pak. Mohon, kami sebagai Anggota DPR RI di Komisi IX ini dilibatkan untuk merangkul, mengajak beliau-beliau, saudara-saudara kita yang punya rezeki lebih, untuk bisa menjadi program, terlibat dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.

Kemudian yang kedua, kaitannya sanitasi akses air bersih dan jamban ini, Pak. Saya mengingatkan saja, apakah Pak Menteri ini sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia? Di sana banyak sekali, Pak, program kaitannya dengan jamban ini, namanya Program Jamban Sehat Komunal. Ada alokasi anggaran ribuan titik yang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya khawatir ini nanti tidak menyentuh atau tidak *ter-connect* dengan program Bapak, khususnya kita bisa mengintervensi di warga-warga yang penyebab *stunting* ini kaitannya dengan sanitasi yang tidak layak.

Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sudah dipaparkan cukup gamblang program-program yang disampaikan Pak Menteri tadi, yang menyentuh orang tua, lansia, ayah, juga anak yang bermasalah atau *stunting*. Nah, saya kok belum melihat program yang dari lembaga yang Bapak Pimpin ini, khususnya menyasar yang generasi Z, generasi remaja, Pak.

Kan kita tahu betul remaja putri, khususnya di tingkat SMA, ini mayoritas mengalami anemia, kekurangan darah. Ini akan menjadi risiko ketika tidak diedukasikan secara dini. Ketika mereka nanti kelak menjadi pengantin, dalam keadaan kondisi tubuhnya masih mengalami anemia, sehingga ada potensi-potensi lagi, di kemudian hari, masih muncul lahirnya bayi-bayi *stunting*. Nah ini program yang menyasar ke remaja ini seperti apa.

Terima kasih, Pimpinan.

Itu saja dari saya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Selanjutnya Bu Tutik. Persiapan, Pak Alifudin.

F-P. DEMOKRAT (TUTIK KUSUMA WARDHANI, S.E., M.M., M.Kes.):

Terima kasih

**Pimpinan yang sangat saya hormati,
Pimpinan Komisi IX beserta seluruh Pimpinan yang ada dan seluruh
Anggota Komisi IX yang sangat saya hormati,
Bapak Menteri dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga yang sangat saya hormati beserta seluruh jajarannya,**

Jadi, mungkin di sini saya ingin menyampaikan suatu aspirasi, Pak. Aspirasi ini juga kebetulan datang dari jajaran di kementerian Bapak, di mana SDM ini nanti yang akan mendukung kinerja Bapak di lapangan, di mana pada tanggal 30, eh mohon maaf, tanggal 13 Februari hari Kamis, saya menerima audiensi dari Forum Penyuluh Nusantara, Pak. Di sini mungkin saya tidak akan uraikan semua karena semua sudah kami catat dan notulen rapat sudah kami catat, semua akan saya sampaikan secara tertulis kepada Bapak. Saya sangat terenyuh, Pak, waktu itu mendengarkan, sehingga saya mohon, Pak, diatensi dan di-*follow up* ya Pak, ya, karena saya tahu sekali Bapak Menteri adalah orang yang sudah berhasil menjadi bupati di Kabupaten Batang saat itu dan sangat peduli kepada masalah sosial.

Terima kasih, Pak. Mungkin ini saya langsung saya sampaikan saja secara tertulis.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Silakan, Bu Tutik, untuk bisa disampaikan.

Selanjutnya, Pak Alifudin. Ini kita memberikan waktu dulu ke Bu Tutik untuk menyampaikan, ya.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Silakan, Pak.

Terima kasih, Bu Tutik.

Silakan, Pak Alif.

F-PKS (H. ALIFUDIN, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

F-PKS (H. ALIFUDIN, S.E., M.M.):

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IX,
Bapak Menteri beserta jajarannya,**

Alifudin nomor Anggota A-481, Dapil Kalbar. *Alhamdulillah* ada juga mantan Kanwil Kalbar ya, Ibu Pintauli, mitra saya, yang mendampingi selama sosialisasi di Kalimantan Barat. Dengan sebab Ibu, salah satunya, Bang Alifudin jadi menang.

Ya pertanyaannya, Pak, bagaimana strategi mitigasi implementasi program-program dengan postur anggaran yang baru? Ya, jadi kami berharap penyuluh itu tidak dipotong lagi, lah. Anggarannya sudah kecil, misalnya karena dipotong, makin kepotong.

Yang kedua, bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk menyosialisasikan aplikasi digital SuperApps, *app* ya, agar menjangkau semua kalangan, khususnya keluarga rentan yang membutuhkan.

Yang ketiga, apakah Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan sejalan dengan target penurunan *stunting*, ya. Jadi terkait dalam situasi penyesuaian, tentu daerah-daerah yang belum ada dapur umum, Pak, ya, apakah masih ditangani oleh Dashat gitu, ya, karena tidak semuanya provinsi ditangani oleh BGN, karena anggarannya. Kalau mengikuti mungkin bisa 1.000 triliun, kali, anggaran BGN ini, karena bukan hanya a

nak sekolah, tetapi ibu hamil, balita, cuma, lansia mengapa tidak masuk gitu, Pak, ya? Lansia enggak masuk dalam program BGN. Bagaimana strategi BN untuk menangani ledakan populasi usia tua?

Mungkin dari kami cukup sekian, ya, intinya itulah dari saya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya Bu Rahmawati. Persiapan, Pak Heru Tjahjo.

F-P. NASDEM (RAHMAWATI HERDIAN, S.H., M.Kn.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX, dan
Yang saya hormati Bapak Menteri dan juga Ibu Wakil Menteri Kementerian
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia beserta
seluruh jajarannya,**

Pertama-tama, saya ingin mengapresiasi Bapak dengan rencana program yang akan dilakukan oleh BKKBN ini di tengah situasi pemangkasan anggaran ini. Tentu, saya yakin, Bapak semua tidak akan mengurangi semangat Bapak-Ibu semuanya dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut.

Di sini yang ingin saya sampaikan, Bapak, dan ingin menanyakan setelah mendengarkan pemaparan Bapak tadi mengenai program yang digagas oleh BKKBN mengenai Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*. Seberapa efektif dan yakin bahwa program ini akan betul-betul berhasil dalam menurunkan angka *stunting*, mengingat pemahaman dan pola pikir masyarakat kita berbeda-beda, Pak? Apakah ada mekanisme pengawasan program untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini di tingkat lokal khususnya?

Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan, Pak Heru. Persiapan, Pak Ahmad Safei.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Teman-teman Komisi IX yang saya hormati,
Menteri beserta jajaran yang kami hormati,**

Sebelum ke apa yang disampaikan, tadi Bu Lucy, sebetulnya prevalensi Jawa Timur sudah 17,7%, kabupaten/kota 14,9%. Mungkin bisa di (*suara tidak jelas*) lagi. Pak Menteri, Bapak harus semangat, karena tugas Bapak sangat berat dan *overall* sangat komprehensif menangani *stunting*, dan banyak di lapangan. Bapak pernah jadi bupati jadi pernah tahu di lapangan.

Yang pertama, Pak Menteri, kami mengapresiasi apa yang dilakukan Bapak. Bapak harus mempunyai hal-hal yang sebetulnya harus kerja sama dengan lembaga dan kementerian yang lain. Yang disampaikan Pak Nurhadi tadi, seperti jamban keluarga, komunal, jamban komunal juga ada, itu di PU juga ada, Kementerian PU ada. Jadi, bukan hanya Kementerian Kesehatan, Kementerian PU juga ada.

Yang kedua, masalah *stunting* ini kalau dulu, zaman dulu kan ada dari catin, ya, terus bumil, pascapersalinan, terus habis itu, pendampingan balita. Nah, apakah di Elsimilnya itu masih jalan? Kalau Elsimilnya masih jalan, berarti Bapak perlu kader untuk menyampaikan kepada masyarakat, karena ini yang sebetulnya masyarakat (*suara tidak jelas*) di daerah. Bapak punya PKB dan PLKB yang pernah kami sampaikan, Pak Menteri, bahwa ini sudah berkurang. Ada dulu yang namanya pramusaji, pramusaji admin. Lah, pramusaji sekarang enggak ada, sekarang tapi dibutuhkan di lapangan, dan itu mohon maaf, honoraria urunan dari PLKB-PLKB dipotong, dikasih pramusaji. Ada datanya, Pak. Ini mohon dilihat, PLKB sudah tidak mendapatkan honor besar, masih urunan, itu ya.

Selanjutnya, Pak Menteri, di dalam catin, calon ibu hamil, dulu kalau enggak salah, saya masih ingat ada, ada Undang-Undang Nomor 174 tentang batas untuk menikah, habis itu direvisi 2022, tapi di BKKBN dianjurkan adalah kesiapan reproduksi yang 21 tahun. Nah, ini yang dipakai yang mana, nanti agar disampaikan kepada masyarakat.

Pak Menteri yang kami hormati,

Di dalam, di lapangan, kondisi penanganan *stunting* ini sebetulnya ada daerah, mohon maaf, kalau Jawa Timur kami memang ada anggaran, melakukan intervensi terhadap kabupaten/kota, baik anggaran provinsi, anggaran kabupaten/kota, dan ADD desa, yang mana itu bisa dilakukan untuk menangani di posyandu, pendampingan posyandu. Di sana kan ada timbangan bayi, ada kartu

biru, kartu sehat, dan lain sebagainya, sampai mengukur LiLA juga itu kan. Itu semuanya adalah ada intervensi dan dari ADD Desa.

Nah, Bapak, apakah Bapak sudah mengeluarkan aturan, instruksi menteri atau keputusan menteri apa pun untuk melegitimasi bahwa Bapak bisa, di daerah bisa berkoordinasi dengan instansi yang lain. Aturannya sangat banyak, Pak Menteri, jadi di *stunting* ini kadang-kadang *oyok-oyokan*. Bahasa *oyok-oyokan* apa ya, bahasa Indonesianya, tarik-tarikan, itu tanggung jawabmu, ini tanggung jawab saya. Lah, ini karena aturannya banyak, Kementerian Kesehatan ada, dan itu terjadi pada saat pelaksanaan di posyandu, ini BKKBN, sedang BKKBN tugasnya ada yang dihonori, ada yang enggak, dan itu terjadi di lapangan.

Oleh sebab itu, Bapak bisa mengeluarkan instruksi menteri yang bisa menjadi landasan untuk di daerah, apa yang saya pegang, ya. Dulu Bapak punya termasuk Suami Siaga dan lain sebagainya kan, jalan semuanya, jadi ibu hamil dan lain sebagainya itu, saya tidak bisa menyampaikan karena waktunya mepet, tapi prinsipnya Bapak harus mempunyai aturan yang bisa berkoordinasi di lapangan.

Yang selanjutnya, Pak Menteri, ada yang namanya *stunting* ini kan termasuk PHBS, zaman dulu PHBS, ya, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Ini hulunya kan banyak, hulunya sampai hilirnya. Nah ini mohon mulai disosialisasikan lagi, termasuk untuk penanganan remaja. Penanganan remaja ini Bapak bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk melaksanakan informasi melalui UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), itu bisa dilakukan di situ. UKS ini mungkin sudah jalan, namun Bapak harus cek kembali, tapi yang jelas Bapak tugasnya berat, Bapak harus koordinasi, keroyokan dengan lembaga yang lain, saya kira itu.

Yang terakhir di model pengelolaan penyaluran MBG. Coba *slide*-nya dibuka Pak, ya MBG. Nah jadi, terus, terus, Pak, yang ada gambarnya ada, ada fotonya anak-anak lagi makan pake *cap*.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Bawahnya lagi, ah.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Ah ini, ah ini tolong dibesarkan gambar yang dua itu, gambar yang tadi ada *cap*, pakai *cap* tadi.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Langsung aja, Pak, bisa disampaikan aja.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Nah itu, Pak Menteri, ini Bapak pernah jadi bupati. Pada saat akan ada tamu kan disiapkan, pokoknya disiapkan *sing apik* supaya *didelok* bagus. Lah, ini Pak, mohon maaf, Bapak juga ikut bertanggung jawab dengan Badan Gizi, enggak seperti ini, Pak, jadi dapurnya itu harus bersih dan itu harus *clean* betul. Saya pernah ngecek, mohon maaf, sudah saya sampaikan di sana, ya tak *duliti* makanan itu itu pusatnya makanan. Jadi, *cap*-nya dipakai, *handscoon*-nya pakai *handscoon*, tapi habis masak *handscoon* begini, terus memegang lagi, kursi dan sebagainya nah. Ini gambar ini bagus, Pak, tapi Pak Menteri koordinasi dengan lembaga yang lain, sebetulnya kondisinya.

Itu saja yang kami sampaikan, termasuk makan, anak-anak makan itu kadang-kadang dilihatkan lagi, dulu BKKBN melakukan gerakan cuci tangan kan. Jadi, setiap sekolah dengan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, setiap sekolah menggunakan, ada wastafelnya untuk cuci tangan. Nah, itu juga.

Saya kira itu, Bu Pimpinan, apa yang kami sampaikan. *Matur nuwun*, sekali lagi, Bapak harus semangat, karena tugas Bapak sangat berat dan harus dikeroyok dengan lembaga yang lain. *Matur nuwun*, mohon maaf,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya Pak Safei. Persiapan, Pak Ashabul Kahfi.

Silakan, Pak Safei.

F-PDI PERJUANGAN (H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Om swastyastu.

Pimpinan, Pak Menteri, Pak, Ibu Wamen, dan seluruh jajaran,

Terima kasih.

Saya kira luar biasa paparan hari ini kepada kita semuanya, karena saya ini latar belakangnya birokrasi, Pak, sehingga apa yang dipaparkan tadi oleh Bapak, saya melihat memang luar biasa dari sisi materi, ya, tapi kemudian kalau kita mengimplementasikan ke bawah, saya kira banyak hal yang perlu kita lakukan.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan begini. Saya kira, sebelum Bapak membuat kerangka ini, memang diperlukan banyak koordinasi dengan kementerian lain, karena hampir seluruh aspek kegiatan yang menjadi tupoksi kementerian ini, itu beririsan dengan kementerian lain, seluruhnya beririsan. Nah, oleh itu, saya kira memang karena (*suara tidak jelas*) jangan ada yang tumpang-tindih. Banyak sekali hal-hal yang Bapak paparkan tadi, saya kira di kementerian lain juga ada semua. Nah, sehingga ini bisa menjadi seperti tidak efisien jadinya, ya, dan kita juga kira masyarakat umum di luar melihat sesungguhnya seperti apa ini, ada jamban. Padahal jamban di Kementerian Kesehatan juga ada, di Kementerian PU juga ada. Rumah juga begitu, di Kementerian PU juga ada, Kementerian Sosial juga ada, ini jadinya dibawa menjadi seperti apa

Kemudian berikutnya, dengan istilah-istilah. Saya kira, jangan terlalu banyak dengan istilah-istilah, Pak. Kita bingung, di bawah, masyarakat ini yang kurang. Ini apa ini, apalagi istilah-istilah itu belum satu program periode sudah ganti lagi. Tadi ada Kampung KB, sekarang jadi apa tadi yang disampaikan Bapak. Mungkin akan diubah lagi, bukan lagi Kampung KB. Ini orang jadi seperti apa? Ini saya kira juga yang perlu, saya kira perlu jadi apa kita semua, ya, karena supaya jangan, supaya kita lebih efisien, lah, sehingga efisien dan masyarakat juga lebih cepat memahami seperti apa ini yang menjadi program ini.

Yang kemudian tadi di *quick win*, Bapak, saya kira, ini yang harus kita lihat. Kalau kita membaca tupoksi, tugas daripada kementerian ini adalah antara lain adalah pengendalian penduduk. Di *quick win* ini tidak ada satu pun saya lihat yang berkaitan dengan pengendalian penduduk. Ini semua justru yang lebih banyak diurus ini 3 dari 5 *win* ini, Gerakan Orang Tua Asuh ini berkaitan dengan orang tua, terus Gerakan Ayah Teladan ini orang tua juga ini ayah, kemudian Lansia Berdaya, ayah juga ini, Pak. Ya, jadi, 3 dari 5 ini, semua berkaitan dengan orang tua juga semua.

Saya kira, mungkin lebih diformula agar supaya memang lebih, lebih apa. Makanya saya dari awal bahwa mungkin lebih banyak mengoordinasikan dulu

dengan kementerian lain, agar supaya, ya bisa tidak saling beririsan, tapi kemudian saling melengkapi lah, iya, kalau ini dilakukan saya kira. Karena kalau kita lihat ini, saya yakin ini, Pak, kalau ditawarkan kepada di bawah tingkat bawah, apalagi kita pahami betul bahwa Bapak tidak punya ordal loh sampai tingkat kabupaten apalagi di kecamatan. Kan yang ada itu cuma *nompleng* di Dinas Kependudukan yang ada di kabupaten, ya, sehingga saya kira sulit, karena Kepala Dinas KB di kabupaten kan merangkap juga dengan ini sekaligus dengan, tapi orangnya kan orang-orang dinas semuanya, orang kabupaten. Ini organ pemerintah daerah, bukan organnya Bapak yang langsung ditempatkan di daerah, sehingga saya kira pengendaliannya, kalau bupatinya tidak mau, ya agak sulit ini jalannya, ya.

Saya kira ini, saya kira, Pak, yang saya kira sekadar masukan untuk Bapak, untuk kita semuanya lah, karena kita ingin agar supaya ini bisa berjalan baik semuanya. Saya kira, kami di Komisi IX selalu memberikan dukungan. Ya, mudah-mudahan ini tugas semua kementerian yang ada ini, sehingga bisa berfungsi dengan baik dan saya kira manfaatnya yang terpenting adalah manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Saya kira demikian, Pak.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan, Pak Ashabul Kahfi. Persiapan, Pak Sihar.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak Menteri dan jajarannya,

Saya tertarik ini, Pak, dengan istilah-istilah ini dan saya sih apresiasi aja ya, karena kan istilah baru mungkin, ya, ada Tamasya, ada *Gate* atau GATE Pak, ini? kalau *Gate* itu kan gerbang, tapi Bapak singkat sini GATE itu bahasa dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak? Bahasa Indonesia berarti GATE, ya? Oke.

Nah, yang kedua, Pak, ini terkait dengan, mudah-mudahan ini bukan menimbulkan ketergantungan, terkait dengan berakhirnya Perpes Percepatan

Penurunan *Stunting* di tahun 2024. Nah, ini menunjukkan bahwa lemahnya program kebijakan yang berkelanjutan yang harus berakhir 2024, terus belum ada perpres yang baru. Nah, dan tentu tidak akan mungkin program *stunting* ini berhenti, hanya karena berakhirnya perpres ini. Olehnya itu, saya dorong agar BKKBN, melakukan program yang bersifat tetap jalan dan mandiri, tanpa harus tergantung dengan perpres yang baru nantinya. Kalau *ndak*, Pak, gimana Bapak mau bekerja, kalau harus menunggu perpres itu turun dulu? Itu yang pertama, Pak.

Yang kedua, Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak). Ini bagus, Pak, tapi saya baca, mudah-mudahan saya salah, saya belum melihat indikator, apa yang akan kita jadikan nanti, untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program ini. Saya hanya di sini membaca angka-angka, seperti adanya *center of excellence* ada 56 pusat, ya. Kemudian, beberapa kegiatan yang belum berbasis pada data. Saya khawatir jangan sampai program ini nanti lebih bersifat administratif saja. Oleh karena itu, perlu solusi, saya tawarkan atau usulan, harus ada mekanisme evaluasi, yang berbasis dampak nyata. Misalnya persentase anak yang mengalami peningkatan gizi setelah masuk Program Tamasya, sehingga kita bisa mengukur, bahwa kehadiran Program Tamasya ini memang memiliki dampak terhadap perbaikan gizi anak.

Nah, yang kedua, ini GATE, apa ini, kita tanya tadi gerakan, ini di samping kiri-kanan ayah semua ini. Ini ide yang bagus, saya kira menarik, Pak, ya, dengan Generasi Ayah Teladan, tetapi kita juga harus memiliki catatan, Pak, bahwa yang namanya ayah itu kan juga memiliki kendala. Contoh, keterbatasan waktu dengan jam kerja yang cukup panjang untuk memberi perhatian kepada anaknya. Kemudian cuti, cuti ayah ini kan sampai hari ini kan belum jelas. Kemarin kami di Komisi VIII ada Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak itu sudah ada cuti, tapi cutinya cuma maksimal 2 hari. Itu pun cuti melahirkan. Ketika istri melahirkan, suaminya juga cuti 2 hari. Nah, terus seperti apa program ini bisa direalisasikan, ketika ayah itu memiliki kendala yang begitu banyak, dari sisi waktu, jam kerja yang panjang, kemudian beban kerja yang berat. Nah, ini mungkin harus serius, bukan hanya sekadar slogan, Pak Menteri.

Nah yang terakhir ini, Pak, ini yang paling penting menurut saya ini, tapi ini sekadar mungkin bacaan saya aja, terkait masalah kendala fragmentasi penanganan *stunting*. Tadi ada beberapa titipan dari kementerian dan lembaga, yang dianggap salah satu bebannya atau apa ya, sehingga fragmentasi penanganan *stunting* ini ternyata, kalau menurut saya, Pak, bukan hanya di kementerian dengan lembaga, tetapi di internal BKKBN sendiri ini terjadi fragmentasi yang perlu dicarikan solusi. Contoh, Pak ya. Pertama, tidak ada integrasi yang jelas antara program-program yang ada. Contoh dalam dokumen sini, terdapat banyak program seperti Tamasya, GATE, Kerabat Kelompok Remaja Berbakat, dan Pemberian Makanan Bergizi Gratis. Namun, tidak ada penjelasan bagaimana program-program ini terhubung dalam satu sistem terintegrasi untuk memberikan dampak maksimal.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Izin, waktu, Pak.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Ya, sebentar, sedikit lagi.

Nah, program ini terkesan berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada mekanisme koordinasi yang jelas antarlembaga pelaksana.

Nah, yang kedua, anggaran tersebar di banyak program tanpa fokus yang kuat. Seharusnya kan ada program-program yang betul-betul fokus, sehingga bisa diukur dan efektif dalam rangka penurunan angka *stunting*. Kalau semua dikasih, Pak, semua anggaran hampir sama, tidak ada yang fokus. Sementara yang menjadi program utama kita, kita ini kan masih angka *stunting*. Indonesia hari ini kan masih di angka 21,7%, Pak. Itu kalau dikonversi, sama dengan ini 4,7 juta, besar banget itu, Pak Menteri, 4,7 juta kalau dikonversi dari nilai 21,7% ini. Contoh, Pak, setiap program memiliki targetnya masing-masing. Misalnya, jumlah pusat layanan yang diresmikan, jumlah peserta edukasi, tetapi tidak ada ukuran bagaimana semua program ini secara kolektif menurunkan angka *stunting*.

Jadi, intinya yang saya ingin sampaikan di sini ialah, tolok ukur, Pak, indikator-indikator yang bisa kita jadikan acuan, sehingga bisa mengukur sejauh mana program ini bisa menurunkan angka *stunting* melalui program di BKKBN.

Sekian, demikian masukan dari kami, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Sihar, silakan. Persiapan Ibu Netty dan Bu Cellica

F-PDI PERJUANGAN (Dr. SIHAR P.H. SITORUS, B.S., B.A., M.B.A.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati kawan-kawan Komisi IX,
Pak Menteri, Ibu Wakil Menteri, Pak Sesmen, beserta jajaran,**

Mungkin saya hanya ingin mengomentari tentang dua poin, yaitu *stunting* dan lansia. Tadi Pak Menteri beberapa kali menyebutkan pentingnya data. Nah, kalau kita melihat presentasi Bapak tadi, Pak, saya lagi nyari-nyari sebenarnya, Pak, beberapa data misalnya tentang tentang usia dengan status ekonomi di dalam prevalensi *stunting*, misalnya. Ya, kalau tadi kita ambil contoh yang disampaikan Ibu Lucy bahwa di Surabaya *stunting* hanya 1,2% sementara kita ini secara nasional di angka 21-an persen, maka kita bisa melihat adanya satu sebaran yang apa, ya, mungkin bisa kita lihat suatu pola ketika ada data.

Maka ketika kita bisa lihat data tersebut, beberapa kebijakan yang tepat sasaran bisa diformulasikan karena kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, mungkin prevalensinya rendah dibandingkan di daerah-daerah lain. Nah, oleh karena itu, kebijakan kita enggak bisa *one size fit all*, satu ukuran untuk semuanya. Jadi, memang harus ada keberpihakan di beberapa daerah yang prevalensinya tinggi. Itu salah satu data yang saya ingin lihat tadi, karena yang saya juga enggak tangkap tadi apakah *stunting* ini di mata BKKBN ini adalah *problem poverty*, kemiskinan, ataukah *food*, makanan, kualitas makanan ataukah kesehatan, kan itu, ya.

Saya mengambil contoh dari Peru, Pak. Peru mungkin itu bisa salah satu studi kasus yang bagus bagi kita, di mana kira-kira 15 tahun yang lalu prevelansinya cukup tinggi sekitar 26, 28%, sementara kita saat itu juga 30-an persen, tapi per hari ini, mereka bisa turun di sekitar 10-an. Nah, kita sementara masih di 21%. Nah, meminjam istilah anak-anak Gen Z sekarang yang katanya harus kolaborasi, saya yakin *stunting* ini adalah kompleks dan multidimensi yang harus memang memaksa kita melakukan kolaborasi antar-K/L dan lembaga sendiri, gitu. Jadi, enggak bisa, mungkin enggak bisa sendirian apabila kita ingin menurunkan ke 14% atau bahkan yang terakhir direvisi menjadi 18%, tapi tetap suatu pekerjaan yang sangat, sangat ini, ya, sangat berat.

Kemudian, tentang lansia. Kalau kita melihat data kembali, Pak, lansia katanya menurut usia, wanita lebih panjang, katanya perempuan lebih panjang dari cowok, Pak, dari dari laki-laki. Jadi, mungkin nanti sekitar. Nanti lansia mungkin dunia tetap ramai sih, Pak, karena banyaknya perempuan daripada laki-lakinya, Pak. Namun, yang saya mau sampaikan adalah begini, pada saat nanti lansia, kita butuh produktivitas, butuh kerja, nah, sementara tingkat partisipasi angka kerja perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sementara, di usia lansia nanti kebanyakan perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, jadi ini perlu ada program jangka panjang, yang sehingga ketika nanti udah kita pada usia-usia pensiun, kita bisa tetap *happy* dengan produktivitas dan juga tetap bisa berkarya.

Yang terakhir adalah data balita, Pak, mungkin yang harus kita juga punya sehingga data balita dan sebaran terutama dengan sebarannya gitu, ya, karena

mungkin tadi kan *childfree* mungkin di Jakarta kebanyakan. Mungkin *fertility rate*-nya rendah di kota-kota besar, tapi di daerah-daerah mungkin *fertility rate* tinggi. Nah, sementara, kalau kita lihat tadi *stunting* itu adalah jangka panjang, karena itu pola hidup yang sudah terbentuk, sehingga kita tergantung kita melihat dari *poverty* apa kemiskinan ataukah kelaparan atau ini ya dari sudut pandang ini, maka ini akan beda-beda, gitu, efeknya terhadap persiapan si ibu untuk melahirkan, karena itu akan menentukan *stunting* juga. Jadi, data balita ini menjadi penting.

Demikian aja, Pimpinan, dari saya.

Terima kasih, Pak Menteri.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Pak Sihar.

Selanjutnya Bu Netty. Persiapan, Bu Celli.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan, atas kesempatan yang diberikan.

**Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI yang saya cintai, saya banggakan,
Saudara Menteri dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga beserta seluruh jajaran yang juga saya hormati,**

Melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh para Anggota terdahulu, saya tampaknya perlu menebalkan, Pak, kenapa? Karena memang apa yang menjadi tugas Bapak di kementerian ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya, baik peta masalah maupun strategi yang akan Bapak lakukan selama 5 tahun yang akan datang.

Nah, beberapa hal yang ingin saya tegaskan, Pak, yang pertama tentang peran kementerian dengan, tadi juga sudah ditanyakan oleh beberapa Anggota, dengan kedudukan Perpres Nomor 72 Tahun 2021, ya. Kita masih ingat betul dan bahkan Komisi IX pada waktu itu mendorong BKKBN sebagai koordinator dari upaya percepatan penanganan *stunting* dan saya sampai hari ini belum mendengar, ya, kalau kemudian peran itu digeser atau kemudian digantikan. Nah, oleh karena itu, mengingat bahwa perpres ini sangat filosofis dalam menangani *stunting*, mulai dari strategi nasional, penyelenggaraannya, koordinasinya, pemantauan evaluasi dan laporannya, serta pendanaannya, kenapa, Pak? Karena kalau ngomong Bapak koordinator, kementerian ini koordinator, ternyata anggaran terbesarnya bukan di BKKBN, Pak, mohon maaf. Nah, oleh karena itu, fungsi

koordinasi ini yang seharusnya dijalankan oleh BKKBN yang sekarang sudah berubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, ya.

Nah, saya tampaknya perlu menanyakan sejauh mana fungsi dan juga strategi Bapak menjalankan koordinasi ini, kenapa? Karena kalau kita lihat, semua pekerjaan sudah dilakukan oleh orang lain ini, Ibu-Bapak, gitu, ya. Ngasih makan oleh BGN, kan begitu, ya. Kemudian spesifik sebagian besarnya juga dilakukan oleh Kemenkes atau kemudian air bersih oleh Kementerian PUPR. Begitu, Pak. Jadi, saya ingin menanyakan itu.

Yang pertama, sebesar apa fungsi koordinasi ini dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga? Karena kalau kita lihat, dari apa yang menjadi ruh BKKBN selama ini adalah pada perubahan perilaku, melakukan intervensi perubahan perilaku. Berarti yang menjadi sasarannya adalah keluarga dan jika kita bicara keluarga tentu yang juga harus dilakukan oleh kementerian adalah mengintegrasikan begitu banyak definisi dan indikator terkait dengan keluarga yang ada di Kementerian Perempuan dan juga Perlindungan Anak dan juga Kementerian Kependudukan yang sebelumnya sudah dibuat iBangga oleh BKKBN. Ada indikator kualitas legalitas dan struktur, kualitas ekonomi, kualitas fisik, kualitas sosial psikologi, dan kualitas sosial budaya. BKKBN juga menetapkan ada indikator ketenteraman, kemandirian, kebahagiaan. Nah, ini nih definisi atau istilah dan indikator ini mau diapakan, Pak? Padahal ini adalah instrumen yang sangat vital dalam melakukan perubahan perilaku di keluarga, ya. Nah, oleh karena itu, saya melihat pertama berarti yang harus dilakukan adalah fungsi koordinasi.

Kedua, Pak, kalau kita lihat tentang implementasi penanganan *stunting* ini, ini tampaknya Bapak juga harus mulai lebih bertaring, Pak, menanyakan apa kabar PKMK di Kemenkes gitu, ya. Saya kok, saya sedih, nih, Ibu Ketua kenapa? Karena sudah dua institusi yang mengatakan bahwa kita akan fokus pada pencegahan *stunting* baru. Jadi apa kabar, nih, 4 juta yang sudah *stunting*, gitu? Siapa yang ngurusin, nih, gitu kalau semuanya berfokus pada pencegahan *stunting* baru? Yang udah *stunting* ini nasibnya gimana? Kan mereka juga anak-anak Indonesia yang berhak mendapatkan akses hidup berikutnya. Berarti PDK-nya juga harus ditanyakan, Pak, PKMK-nya nasibnya seperti apa ini juga menjadi bagian dari fungsi koordinasi yang harus dilakukan oleh kementerian. Itu yang pertama terkait dengan *stunting*.

Yang kedua, Pak, program Bapak tadi sebenarnya sudah di-*mention* oleh teman-teman. Luar biasa, ada Sidaya, ada Tamasya ada Kompak Tenan, ada Gate, enggak tahu Gate-nya itu GATE atau Gate, Pak. Kalau saya, sih, menyarankan, Mbak Nini, harusnya digantinya tu jadi Gati. Kalau orang Jawa, tuh, tahunya Gati loh, Pak, ya Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Pak. Itu lebih sebutannya lebih meng-Indonesia, ketimbang tadi ditanyakan ini bacanya Gate

atau Gate, gitu. Ada lagi getek, Pak. Itu hati-hati kalau orang Sunda lain lagi maknanya, Pak, kalau getek, ya. Seperti itu, Pak.

Nah, saya hanya ingin mengingatkan, program Bapak ini banyak sekali dan bahkan, dari judulnya aja ini luar biasa sangat indah, tapi bagaimana kita mengimplementasikan di tengah perubahan nomenklatur, saya enggak tahu di daerah seperti apa, apalagi di kota/kabupaten. Kalau di provinsi saya masih semangat, Pak, karena BKKBN-nya masih lembaga vertikal, tapi kalau sudah di kota/kabupaten, Pak, menerjemahkan tadi Gerakan Ayah Teladan dengan Pengasuhan Anak, ini kan dua hal yang irisannya sangat kuat. Ini di mana ini diferensiasinya dan penajamannya seperti apa? Fokus penajamannya seperti apa? Nah, itu juga menurut saya perlu dipertanyakan, Pak.

Yang berikutnya, Pak, ini kok hampir sama sama Kemenkes, aplikasinya banyak, Mbak. Ini juga perlu juga dipertimbangkan, Pak, ada daerah-daerah....

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Izin, waktu, Bu Netty.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Iya, ada daerah-daerah yang memang akrab dengan teknologi, gitu. Ada daerah-daerah yang boro-boro, Pak, ngomongin aplikasi yang sangat rumit begitu ya, Elsimil dan seterusnya begitu, ya. Nah, menurut saya ini juga perlu menjadi pertimbangan Bapak.

Terakhir, saya tadi baca, Pak, sebenarnya sudah di-*mention* tadi sama Bang Sihar, ya, *childfree*, ya. *Childfree* ini maknanya apa, Pak? Kalau Bapak kan di situ itu cuma menempatkan *childfree* dari 7% naik jadi 8%. Nah, terus kira-kira kementerian *action*-nya apa, nih, gitu. Kalau menurut saya, kok kita juga harus mulai berfokus bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini adalah *political will* Presiden membentuk sebuah kementerian yang ingin menjadikan keluarga sebagai *cross-cutting issue*, ya, sehingga pembangunan keluarga Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang diyakini oleh bangsa Indonesia, berbasis berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, fenomena *childfree* ini harus direspon, Pak, bukan cuma sekadar angkanya dimunculkan. *So what*, gitu. Gitu, ya, maksudnya setelah ini diapakan? gitu, ya. Nah, menurut saya, angka-angka ini tentu juga harus dijelaskan, Pak, termasuk tadi angka tingkat pengangguran terbuka atau tingkat partisipasi angkatan kerja dan seterusnya metodenya apa, dan kira-kira program apa yang kemudian bisa meningkatkan menurunkan dan seterusnya.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, Pak, ini mau saya perpanjang, Pak.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Kita perpanjang 30 menit, ya.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terakhir, Bu Cellica, silakan.

F-P. DEMOKRAT (dr. Hj. CELLICA NURRACHADIANA, M.H.Kes./KAPOKSI):

Iya. Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi IX DPR RI, Pak Menteri, Bu Wamen, dan seluruh jajaran dari Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga,

Sudah banyak dijelaskan dan menjadi ilmu baru, ya, buat saya yang memang baru saja duduk di kursi legislatif. Namun, tentunya, tadi saya sedikit menyimak, ya, mudah-mudahan tentunya besar harapan, pengalaman-pengalaman kita semua yang ada di sini bisa memberikan manfaat yang lebih bagi pengendalian penduduk dan juga menciptakan keluarga yang bahagia.

Nah, yang pertama tentunya, saya hanya ingin memberikan masukan, karena memang tadi keterkaitan dengan banyak kementerian dan lembaga, ketika saya melihat ada capaian indikator intervensi spesifik tentang remaja putri konsumsi TTD, padahal selain kita menyelesaikan masalah *stunting* yang lama, kita juga akan fokus di pencegahan *stunting* yang baru. Berarti dari mulai remaja, terus juga persiapan kehamilan, dan hamil, dan sebagainya, itu juga menjadi lokus utama kita semua untuk kita mitigasi akan terjadi *stunting* pada kasus yang baru.

Nah, kalau kita lihat di sini target capaian untuk remaja putri konsumsi TTD itu hanya 58%, satu-satunya capaian yang melonjak yang melompati dari target yang ditentukan oleh pemerintah. Padahal kalau kita berpikir, ini sangat mudah sekali kita lakukan, bahkan targetnya bisa capainya 90% dari target 100%, kenapa? karena pertama lokusnya jelas, di sekolah, SMP, SMA, SMK, dan sederajat lainnya, itu kita bisa lakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dalam hal ini adalah anak-anak, Dinas Pendidikan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota. Nah, ini penting sekali menurut saya, karena ini menjadi dasar landasan kita untuk mencegah *stunting* pada kasus yang baru, dimulai dari remaja. Jadi, coba untuk dikoordinasikan, apakah memungkinkan enggak sih targetnya kita naikkan, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk menekan *stunting*, di samping tentunya juga nanti mulai ibu hamil, terus juga bumil yang KEK mendapat tambahan asupan gizi dan lain sebagainya, kalau kita bicara preventif. Kalau kita bicara preventif. Itu yang pertama.

Nah, yang kedua, ini hanya sedikit pengalaman sedikit, bahwa waktu di Karawang, saya dulu berpikir begini, yang di pedesaan pasti banyak kasus *stunting*-nya. Dulu kami Karawang itu 20 koma sekian persen, dalam waktu 1 tahun saya turun sampai 6 digit jadi 14%, dan target 2023, 8% tapi tidak tercapai, hanya baru di angka 10%. Nah ternyata unik sekali yang *stunting* itu banyak dekat kantor pemda, Pak, di perkotaan. Setelah saya selidiki, kenapa di perkotaan? karena banyak ibunya yang bekerja, menitipkanlah anaknya kepada tetangganya, terus ada yang mengasuh, dan lain sebagainya. Ini waktu itu menjadi bahan pemikiran saya, oh ternyata salah saya punya persepsi, salah saya punya analisis. Akhirnya saya intervensilah yang ada di perkotaan untuk penurunan *stunting*, termasuk kasus baru. Kasus baru pun justru ada di sekitar industrialisasi, di kawasan industri. Itu kasus baru saya, kenapa? Oh ternyata ibu-ibu pada bekerja, mereka titipkan pada neneknya yang, mohon maaf ya, mungkin atau pada tetangganya atau orang-orang yang mereka dipercaya, sehingga gizinya ini tidak teramati dengan baik. Pemenuhan gizi seimbang tidak teramati dengan baik. Nah, mungkin itu juga menjadi sarana kita untuk pemikiran bersama bahwa tentunya setiap daerah punya cerita yang berbeda, punya intervensi yang berbeda-beda, dengan keanekaragaman yang berbeda-beda

Nah ini mungkin sedikit masukan yang mungkin nanti juga bisa diinvestigasi secara menyeluruh, ya, seluruh Indonesia, karena pastinya ceritanya beda dan juga penanganannya berbeda.

Itu saja mungkin dari saya, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Yahya, silakan.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri Mendukbangga beserta jajaran saya hormati,

Pertama, saya memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program-program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Mendukbangga, khususnya dalam melakukan kreativitas dan inovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah bagaimana melibatkan partisipasi swasta dalam pencegahan *stunting* ini, saya kira luar biasa. Kalau boleh diuraikan, Pak Menteri, kita perlu ingin mendapat informasi juga ini. Kan teman-teman tadi banyak yang menghendaki ini kalau kita dilibatkan juga, lah, kira-kira begitu di dapil kita masing-masing, karena ini menarik ini, sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan selama ini, yang pertama.

Yang kedua, kalau kita melakukan sosialisasi di dapil, saya diajari oleh teman-teman dari BKKBN waktu itu. Menurut mereka, masa-masa kritis pencegahan *stunting* itu ada di seribu hari pertama kehidupan, itu menurut mereka. Kita belajar, Pak, akhirnya kita pintar juga ini karena sosialisasinya banyak itu hampir tiap 2 minggu sekali kita sosialisasi diajari oleh bapak-bapak dari Kemendukbangga yang dulu namanya BKKBN. Nah, kalau intervensi spesifik dan sensitifnya itu diarahkan ke seribu hari pertama kehidupan, maka tentu ini akan menjadi hal yang sangat prioritas, tetapi saya belum melihat tadi dari lima *quick win* itu yang menyentuh seribu hari pertama kehidupan itu belum ada, Pak Menteri. Ini perlu mungkin di disusun, dirumuskan, kira-kira mau masuk di mana dari lima *quick win* tadi. Itu yang kedua, karena ini sangat sensitif.

Katanya kalau berhasil mencegah di seribu hari pertama kehidupan, maka bebas dia. Iya kan, sementara, apa namanya intervensi terhadap seribu hari pertama kehidupan itu pengobatan atau pencegahan atau apa namanya hanya berhasil sekitar 20%, menurut Kementerian Kesehatan, selebihnya tidak berhasil. Jadi, kalau orang sudah, anak-anak sudah kena *stunting* itu tingkat keberhasilan pengobatannya itu atau intervensinya itu hanya 20%, sedangkan yang 80% tidak berhasil, tapi ada juga mazhab yang mengatakan *stunting* tidak bisa diobati, betul, ya? Jadi teman-teman di Kementerian BKKBN Kemendukbangga itu kalau kita sosialisasi hampir mengatakan mazhab yang *stunting* tidak bisa diobati, tapi Kementerian Kesehatan mengatakan *stunting* bisa diobati hanya 20%. Ya, saya kira itu yang kedua.

Yang ketiga, kalau kita melihat ada Gerakan Ayah Teladan, lalu ada pertanyaan, Pak Menteri, peranan ibunya di mana? Ya, kan? Padahal ibu ini juga

sangat penting pada waktu hamil dan menyusui. Jadi, mungkin perlu disisipkan juga ini jadi Gerakan Ayah dan Ibu Teladan, misalnya, begitu ya, karena memang hipotesanya ini kan dalam rangka 20% kehilangan peran ayah kan begitu, sehingga, iya, *fatherless* ya kan, sehingga gerakan ayah menjadi teladan itu menjadi penting, tapi pertanyaan saya, ibunya di mana ? Nah, ini barangkali perlu dipikirkan juga peranan ibu ini.

Nah, yang terakhir, kalau kita mengikuti data, mencermati data kaitannya dengan Makan Bergizi Gratis, ibu hamil itu ada sekitar 4,8 juta, betul, ya? Data dari Kementerian Pendudukan sekitar itu. Ini sangat penting dan strategis, saya kira, kalau diintervensi melalui Makan Bergizi Gratis. Cuma, yang sudah berjalan selama ini kelihatannya fokusnya masih ke siswa, ya, kan? Yang 3.000 siswa itu, sedangkan yang ibu-ibu hamil dan menyusui belum, itu setahu saya, dari sekitar 245 apa namanya satuan pelayanan Makan Bergizi Gratis yang sudah dibentuk oleh BGN. Nah, bagaimana mengintegrasikan 4,8 juta ibu hamil ini ke dalam Program Makan Bergizi Gratis? Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ini sudah dikoordinasikan dan di-MoU-kan, walaupun belum dilaksanakan, tapi ada *cost* yang harus ditambah karena untuk mengantar ke ibu hamil itu memerlukan biaya, nanti melibatkan TPK. Nah, bagaimana ini apa namanya polanya, kira-kira begitu, sehingga bisa berjalan dengan baik dan tersinkronisasi dengan baik? Kami minta juga supaya ada percepatan juga ya kan pelaksanaan melibatkan ibu hamil dan ibu menyusui dalam program BGN, karena BGN waktu lapor ke kita belum ada, fokusnya masih kepada siswa yang 3.000 orang itu.

Saya kira, itu, Bu Nini.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam.

Silakan, Bu Putih Sari.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ya, terima kasih.

Bu Ketua dan Pimpinan serta para Anggota Komisi IX yang saya hormati, Kementerian Kemendukbangga, Pak Menteri, Bu Wamen beserta seluruh jajaran,

Sudah banyak tadi disampaikan oleh rekan-rekan, ada beberapa saja saya tambahkan. Yang pertama saya ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan Perpres 72/2021, ya, yang khusus memang untuk *stunting*, infonya katanya lagi direvisi. Saya enggak tahu, mohon mungkin disampaikan seperti apa progresnya atau mungkin akan berakhir gitu, ya, progres yang lama ya, tapi tentu ini penting saya kira karena di dalam rangka program percepatan penurunan *stunting* kan tetap harus berlanjut, ya.

Nah, kalau peraturan ini entah mungkin direvisi atau mungkin akan diganti, ya, tapi tentu ini akan mempengaruhi rencana program yang baru yang mungkin juga disusun oleh Pak Menteri beserta jajaran itu akan seperti apa kalau peraturan tersebut, tadi ya, mungkin berubah dan tentu kembali lagi mengingat keberhasilan *stunting* ini ya sangat bergantung ya pada koordinasi antar banyak sektor, ya. Informasi tentang perubahan regulasi ataupun juga kebijakan ini menjadi sangat krusial, menurut saya, ya.

Di sini juga Pak Menteri tadi sampaikan saya baca di paparan memang banyak sekali hal-hal terkait dengan koordinasi lintas kementerian/lembaga ya yang sudah dijalankan atau mungkin yang masih akan dijalankan, karena memang banyak sebutan-sebutan terkait dengan koordinasi dengan berbagai kementerian, tapi memang tidak dijelaskan lebih lanjut, seperti yang tadi disampaikan, bagaimana ini koordinasinya gitu, kan. Bagaimana koordinasinya, apa yang dilakukan secara nyata di dalam setiap masing-masing program yang dimiliki oleh Kemendukbangga ini. Apalagi tadi saya lihat juga disampaikan terkait, contohnya, *aging population* penduduk lansia di Indonesia yang sudah lebih dari 10%. Di sini disampaikan artinya ada 27 juta penduduk Indonesia yang memang sudah berusia lanjut, gitu. Nah, di kementerian lain, ada Kemensos, Kemenkes, kementerian lain itu juga punya program, setahu saya, ya, punya program untuk lansia ini. Jadi, tentu, ini penting, bagaimana bentuk integrasi programnya, ya, bentuk integrasi programnya itu seperti apa. Jangan sampai, kami berharap, ini enggak jalan sendiri-sendiri gitu, ya, harus tetap ada koordinasinya. Apa yang memang menjadi kekhasan dari Kemendukbangga ini, ya. Yang dikerjakan oleh Kemendukbangga untuk lansia ini apa, gitu, itu harus ada pembedanya, harus ada pembedanya.

Lalu, yang selanjutnya juga terkait dengan di media sosial juga banyak saya mendengar pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Satgas *Stunting*, Pak, di daerah, ya. Mungkin ini bisa disampaikan, kelanjutannya seperti apa Satgas *Stunting* ini, baik di pusat juga maupun juga mungkin di daerah. Termasuk juga sebenarnya kan Kemendukbangga ini atau BKKBN ini juga punya tenaga-tenaga unggulan di lapangan. Itu ada teman-teman PLKB juga. Nah, ini kami minta juga di-*updating* mungkin seperti apa jumlahnya sampai dengan hari ini, ya. Mohon bisa mungkin nanti disusulkan data-datanya di masing-masing provinsi, termasuk juga tentunya rencana optimalisasinya dari peran-peran teman-teman PLKB ini ke depan, ya, akan seperti apa untuk bisa mendukung program-program yang ada di Kemendukbangga ini.

Yang selanjutnya, ini terkait dengan pelayanan digital. Ya, tadi ada beberapa program-program yang memang berbasis teknologi, yang memang berdasarkan aplikasi-aplikasi, ya, Elsimil dan lain sebagainya, yang ini ya punya potensi besar gitu, ya, tapi memang kami berharap ada penjelasan yang lebih mendalam, Pak Menteri, bagaimana aplikasi-aplikasi ini akan diintegrasikan mungkin dengan sistem-sistem yang lain yang memang sudah ada. Tentu, tanpa ada integrasi yang baik, penggunaan-penggunaan dari apa pun aplikasi itu tentu akan justru menjadi beban tersendiri bagi penggunanya, terutama tentunya bagi teman-teman petugas yang ada di lapangan, tentu ini menjadi tidak efektif, gitu.

Itu, saya kira, beberapa hal yang ingin saya tambahkan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Bu Putih.

Selanjutnya, Bu Ketua, silakan.

F-P. NASDEM (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik, terima kasih waktu yang diberikan.

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri dan tim yang hadir yang saya hormati,**

Menyambung dari teman-teman yang bertanya, mulai dari pertama, kemudian Bu Netty juga banyak menggali, ya. Pak Menteri, yang saya ingin di sini kan ada yang program belum di-*launching*, ya, mungkin kayak ini AI ya, ini yang belum di-*launching*. Ini seperti apa, Pak? Biar menjelaskan kepada kami seperti apa programnya. Kemudian ini Genting/Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*, ada di mana mereka? Apakah setiap daerah? Atau setiap kecamatan, ya, minimal, apakah ada mereka ini Gerakan Orang Tua Asuh? Dan siapa mereka ini orang tua asuh yang dimaksud, gitu.

Kemudian, biar juga diketahui, karena ada di sini saya lihat ada beberapa juga yang Pak Menteri sampaikan siapa mereka, yang kalau kayak penerima tadi, yang rumah itu penerimanya siapa, ada keluarga, itu bagus juga kami bisa tahu.

Kemudian, di sini ada, karena tidak ada halamannya ya, Pak, jadi, saya mau sampaikan agak susah, jadi, saya sebut saja. Ini kayak jumlah penerima Genting di sini ada 32.203, ini bantuan nutrisi, air bersih, jamban sehat, dan lain sebagainya. Ini barang ini, yang diberikan ini, bantuan ini, ini bantuan dari mana, Pak? Ini kan perlu kita tahu, ya. Apakah dari BKKBN sendiri atau dari

kementerian/lembaga mana? Ini informasi sampai ini bisa 32.000, siapa yang memberikan informasi? Dari lembaga/kementerian mana yang memberikan informasi? Karena ini tentunya kaitannya juga dengan Kementerian Sosial, ya. Kita ingin digabung dengan kaitannya dengan Kementerian Sosial yang banyak memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, Pak. Jadi, memang betul, jangan sampai ini tumpang tindih, Pak.

Kemudian, halaman berikutnya, gambaran *before-after* pelaksanaan Genteng, Pak. Di sini kan Bapak sampaikan provinsi mana, ada empat provinsi, ya, kemudian bahkan disampaikan perempuan, laki-laki dari berapa kilo sampai sekian kilo, berat badannya, setelah itu dan di sini digambarkan kondisi normalnya. Nah, ini kan yang disampaikan, contoh mungkin ya, contoh 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Ini bagus, Pak, dan seperti ini mereka ada di mana, tapi kalau gambaran lengkapnya, juga kami mendapatkan data lengkapnya, kami Anggota DPR perwakilan dari seluruh wilayah ini kan juga bisa membantu, Pak, bisa membantu turun juga ke lapangan, ya.

Kemudian, tadi bedah rumah yang tadi saya sudah sampaikan, Bapak sampaikan di sini, di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Pak Hendrik, ya, lengkap, ya. Jadi, tadi itu yang saya tanya siapa, anggaran dari mana.

Kemudian yang Program Taman Asuh Sayang Anak, ini Tamasya, Pak. Kalau saya lihat di sini, Pak, yang pertama di sini urgensinya ada tiga poin. Nah, yang poin yang kedua, karena poin ketiga sudah disampaikan oleh Ibu Netty. Poin kedua, di sini tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sekian persen, kaitannya apa, Pak? Ini boleh juga dijelaskan kepada kami dengan, jadi lebih rendah dibandingkan tingkat partisipasi antarangkatan kerja apa namanya laki-laki. Ini coba, Pak, karena *outcome*-nya di sini, kalau saya lihat tuh TPAK perempuan menjadi 70%, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 80%. Ini untuk *impact* 2045 seperti apa, Pak? Mungkin boleh diperjelas gambaran ini kepada kami, Pak.

Kemudian di sini ada penataan suprastruktur dan penataan infrastrukturnya di sini sudah disampaikan. Nah, lagi-lagi, Pak, untuk penataan infrastruktur bagian C pendampingan orang tua/keluarga, ya, Bina Keluarga Balita, ini juga siapa mereka, Pak? Ya, dan ada di mana mereka ini?

Kemudian yang masalah lansia tadi. Kalau di Jawa Timur tadi saya sudah dengar dari Ibu Lucy sampaikan, tapi di tempat kami, Pak, Sulawesi Utara, saya sampai hari ini, karena saya sendiri enggak pernah diundang atau dilibatkan dalam urusan seperti ini, khusus lansia. Nah, saya bingung seperti apa, ya, programnya dari waktu ke waktu. Ya, kita berharap, ke depan, untuk urusan bagaimana penanganan ke lansia kita biar seluruh Anggota DPR, yang ada khusus di Komisi IX, Pak, biar dilibatkan mereka, seperti apa, karena kami kan punya waktu, Pak, tiap kali reses turun ke bawah mungkin kami bisa akan lakukan hal yang sama apa yang sudah dilakukan oleh BKKBN. Kan ini satu program, yang kalau

program itu bagus, kenapa kita tidak lakukan, gitu, karena kami ada waktu untuk itu.

Saya kira itu, Pak, yang saya tanyakan. Mohon untuk jawabannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Bu Ketua.

Sebelum saya berikan waktu ke Pak Menteri, saya juga ingin menambahkan beberapa.

Yang pertama, Pak, tadi soal Ayah Teladan, saya pikir bagus program ini, cuma mungkin yang ditanyakan beberapa teman adalah mungkin namanya, kalau saya usul, Orang Tua Teladan, Pak, karena tugas mendidik anak tugas merawat anak bukan hanya tugas ibu, bukan hanya tugas ayah, tapi tugas orang tua. Kalaupun tadi filosofinya dari ayah teladan tadi soal *fatherless*, terus tadi ada Pak Kahfi yang menyampaikan soal waktu dan sebagainya, lah apa kabar kami yang perempuan-perempuan duduk di sini? Bu Putih ini punya balita juga gitu, apa kabar kami juga, tapi maksud saya sebenarnya program ini bagus, cuma mungkin konsepnya perlu ditata lebih *balance* lagi. Jadi, mungkin Orang Tua Teladan lebih bisa meng-*encourage* semua pihak, yakni ibu dan ayah, karena lagi-lagi, tugas mendidik anak tugas merawat anak itu bukan tugas ibu dan bukan tugas ayah, tapi tugas orang tua. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya usul, mumpung ini masih soal *apps* tadi masih sedang *on progress*. Saya usul dimasukkan soal kesehatan reproduksi, karena saya tadi lihat hanya soal pernikahan, perkawinan, soal psikologis, soal apalagi, soal kesehatan reproduksi belum masuk, karena kesehatan reproduksi jangan sampai anak-anak kita ini pengen tahu soal kesehatan reproduksi di mana-mana. Jadi, saya pernah melakukan secara *random* di tempat saya padahal tempat saya di pesantren, ya, Pak, ini saya *random* lihat di mejanya anak-anak, meja sekolahnya anak-anak, ternyata itu di meja itu banyak sekali gambar-gambar yang itu sebenarnya yang urusan kesehatan reproduksi. Sebenarnya, dari situ saya menyimpulkan, anak-anak ini butuh informasi seperti ini, cuma memang kita sendiri memang di Indonesia masih tabu untuk membicarakan soal kesehatan reproduksi.

Kalaupun akhirnya mereka bertanya, mereka bertanya kepada internet yang mereka hanya satu arah saja, sehingga tidak ada penjelasan secara *detail*. Kalau tanya ke orang tua, biasanya juga diomeli, ngapain tanya soal kesehatan reproduksi, apalagi kesehatan seksual, ngapain tanya seperti itu. Nah, itulah yang menjadikan kita ini kadang-kadang tidak paham untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Kalau *apps* seperti itu nanti bisa soal kesehatan reproduksi dan seksualitas,

itu mungkin akan lebih baik lagi, karena soal kesehatan reproduksi dan seksualitas ini bukan soal bagaimana berhubungan seks, tapi bagaimana menjaga kesehatan reproduksi kita. Itu yang kedua.

Yang ketiga, Pak, memang program tadi sudah sampaikan banyak teman-teman soal program ini banyak sekali dan akhirnya dengan anggaran yang kemarin tentu anggarannya yang luar biasa, yang harus adaptasi efisiensi yang luar biasa, Pak. Tentu pertanyaan kita sama dengan teman-teman yang lain, ini anggarannya dari mana, ya? Anggaran dari mana, Genting, Tamasya, apa tadi Gate, apa GATE tadi, Sidaya dan sebagainya? Ini anggaran dari mana, yang tentunya ini, jangan sampai ada program yang bagus, tapi akhirnya hanya secuil-secuil, Pak, gitu loh. Jadi, contoh nih, nanti 1 program bagus, tapi hanya penerima manfaatnya cuma, katakanlah, seribu. Seribu, tapi kalau untuk di Indonesia, seluruh Indonesia ini tentunya sangat sedikit sekali, Pak, nah ini kita tentunya bikin program yang bagus yang nantinya bisa diterima oleh banyak orang.

Yang terakhir, Pak, titipan dari mitra kita juga dari BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Saya tahu ini tentu tidak pas juga bertanya kondisinya keuangan dari kementerian soal teman-teman pendamping KB ini. Soal salah satu tanggung jawab kita di pemerintah, yakni bagaimana juga memastikan kesejahteraan mereka dengan BPJS Ketenagakerjaan. Itu kan juga menjadi salah satu poin kesimpulan kita juga, Pak, di Januari tanggal berapa itu yang kemarin kita rapat.

Itu saja, Pak. Silakan untuk bisa merespon.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Terima kasih, Pimpinan dan seluruh Anggota DPR Komisi IX, Ibu Nihayatul, Ibu Putih Sari, Ibu Netty, Ibu Cellica. Izin, saya sebut satu-satu dulu. Ibu Netty, Pak Sihar, kalau salah saya mohon maaf, Bu Tutik, Pak Safei, Pak Saiful Kahfi, Bu Rahmawati, Pak Heru, Ibu Lucy, Pak Alifudin, Pak Nurhadi, Bu Tutik sudah, Bu Lucy. Kalau ada yang belum, saya mohon maaf.

Saya mulai dari ketika saya dilantik, kemudian saya belajar. Kemudian kira-kira begini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini, menurut saya, kementerian negara maju. Saya sampaikan ke teman-teman, ini urusannya dua, urusan kependudukan dan pembangunan keluarga yang alat ukurnya tidak bisa dilihat dengan cepat. Kemudian hasilnya tidak seperti infrastruktur, jalan rusak, bangun jalan kelihatan. Itu kalau saya sebut, kementerian negara-negara berkembang. Kalau kita ini kementerian negara maju, apa hubungannya, Pak Menteri? Tentu saya sangat senang, saya sangat berterima kasih masukan tadi yang berkenaan *stunting*, misalnya, saya mau menjawab ini.

Ketika ngomong *stunting*, saya berdiskusi berdebat dengan Menteri Kesehatan, kira-kira, "Pak bisa diselesaikan satu kementerian untuk

menyelesaikan stunting?” Kata Menteri Kesehatan, “Enggak bisa Pak, Pak Wihaji. Asupan gizi saya kasih tiap hari, tapi kalau pernikahan dini tetap ada, ya, stunting tetap ada. Pernikahan dini tidak bisa saya selesaikan,” kata Menteri Kesehatan. Saya berdiskusi dengan kementerian terkait, “Pak saya kasih air bersih tapi ternyata sanitasi tidak ada, ya tidak bisa, Pak, tetap stunting.”

Artinya, Bapak-Ibu, saya setuju karena itu saya sudah koordinasi dengan kementerian terkait, tetapi juga mungkin juga dalam hal ini saya sampaikan secara diskusi, “Pak, bisa enggak Bapak tangani? Kalau enggak bisa, oke saya tangani,” karena tugas kementerian kita adalah kementerian kolaborasi sinergi, tapi bukan menko, tapi juga bukan perencanaan. Kementerian kita ini pelaksana sinergi dan kolaborasi, kira-kira gitu, karena yang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian, tugasnya kementerian kita, Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, termasuk *stunting*, maka mungkin nanti saya tidak satu-satu secara umum.

Kira-kira begini, saya setuju masukannya khususnya tentang, pertama, menu *stunting*. Coba siapkan dulu menu *stunting* biar nanti Bapak-Ibu saya berharap juga turut menjadi bersama-sama, termasuk di dapil Bapak-Ibu sekalian, saya kira nanti biar kita juga buka datanya, ini siapa, orang tuanya siapa, anaknya siapa. Bapak-Ibu, data yang pertama adalah data anak asuh. Anak asuh datanya dari 8,6 juta KRS/Keluarga Risiko *Stunting*. Dari 8,6 juta, saya pilah lagi, yang seribu hari HPK. Di luar itu jarang.

Karena itu, dari 34.000 tadi, 33.000 itu semuanya HPK, anak asuh yang kira-kira mulai dari maksimal 2 tahun. Di atas 2 tahun, tidak masuk dalam data anak asuh, karena argumentasinya sesuai dengan Pak Yahya Zaini tadi, salah satunya kalau sudah di atas seribu hari katanya susah disembunyikan, susah disembunyikan, sembuhkan, cuma 20% yang bisa disembuhkan, sehingga ketika ditanya siapa anak asuhnya, KRS, maka *by name*, *by data*, *by foto*. Semua ini ada fotonya kenapa dan siapa namanya.

Termasuk, izin, Pimpinan, orang tuanya juga ada. Nanti bisa kita kenalkan juga siapa sih orang tuanya. Orang tuanya ada empat kategori, coba dilihat ini siapa saja orang tuanya, satu, perorangan; dua, korporasi; tiga, BUMN-BUMD; empat, perguruan tinggi. Perorangan rata-rata menjadi orang tua asuh untuk asupan nutrisi, korporasi rata-rata air bersih. Contoh, saya kolaborasi dengan BUMN PTPN, itu dari sembilan provinsi nanti akan dibantu untuk air bersih. Beberapa titik air bersih dibantu PTPN. Saya juga kerja sama dengan Hipmi, saya juga kerja sama dengan Kadin, saya juga kerja sama dengan korporasi-korporasi di tingkat provinsi masing-masing untuk membantu non-nutrisi. Contoh tadi RTLH, mohon maaf, rumah layak huni, itu juga nanti korporasi, karena agak lumayan pembiayaannya. Di Kalimantan, terutama Kaltim, nanti bisa dicek yang Dapil Kaltim barangkali kalau ada, ada delapan korporasi yang membantu anak asuh *by name*, *by address*, dan sampai sekarang beliau korporasi....

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Pak Menteri.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Siap.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Izin dulu, kita perpanjang, ya? Sampai jam 13.00, ya?

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Siap.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

(RAPAT : SETUJU)

Lanjut.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Terima kasih.

Sehingga, ini nanti biar saya setuju dengan Bapak-Ibu sekalian, nanti datanya biar jelas, berapa, ini siapa, tinggal di mana, seperti apa kondisinya, tolong nanti dibuka semua. Itu datanya di *dashboard*, kita punya *dashboard*, siapa yang melaporkan? Kaper. Kaper sudah kita kasih buku panduan, saya bikin Keputusan Menteri tentang Buku Panduan Genting terhadap Orang Tua Cegah *Stunting* atau mekanismenya. Pertanyaannya, gimana kalau enggak dikontrol? Kita bentuk tim, namanya tim pengendali sebagai pengontrol dari program ini, karena saya termasuk setuju dengan Bapak-Ibu program ini kalau enggak dikontrol, saya pastikan gagal. Saya yakin semua program kalau enggak dikontrol pasti gagal dan saya tahu, Pak Heru, benar, jadi, kita ini orang lapangan. Bagusnya kalau kita turun saja, kalau enggak turun kadang-kadang laporannya tidak sesuai, dan betul-betul saya kontrol. Saya telepon satu-satu, datanya ini benar enggak. Ini negara, ini pemerintah, jangan nanti main-main dengan data. Ini bukan main-main, karena itu saya pastikan saya telepon, benar enggak, di mana, fotonya, umurnya, namanya, gitu.

Maksud saya, Bapak-Ibu, memang ini agak fokus saya, salah satunya Genteng ini, pertama, memang tidak melibatkan uang negara serupiah pun, karena orang tua asuhnya adalah memang korporasi BUMN-BUMD, kemudian, mohon maaf, perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini khusus edukasi. Jadi, khusus perguruan tinggi, ini edukasi. Ada beberapa, mohon maaf, ini dapilnya NTT, Jawa Barat, kita sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang nanti mengedukasi tentang beberapa sebab, karena *stunting* ini agak rumit dan kompleks, termasuk budaya, tapi sensitif. Saya enggak bisa bicara, kecuali menjelaskan secara lokal, cara-cara Jakarta tidak bisa dibawa dengan cara-cara NTT, cara-cara Papua, enggak bisa, beda.

Itulah yang tadi, Bu, Pak Pimpinan, termasuk digital. Digital, harapan saya, ini menyederhanakan untuk sosialisasi dengan cara-cara yang lucu, tapi kena. Contoh, misalnya, kalau di TikTok itu ada iklan kondom itu, mohon maaf. Itu sederhana, bahasa-bahasa rakyat, tapi kelihatannya kena pendidikannya yang di mohon maaf di pasar, saya enggak bisa nyebut merek. Ya, enggak apa-apa lah, Indomaret lah, enggak apa-apa. Terlanjur ini, pasar modern. Ya, kira-kira gitu. Itu kan ada contoh, tentang iklan. Itu sederhana, itu kalau nanti dibikinkan dengan cara-cara lokal, pasti kena. Jangan kita ceramahi. Zamannya juga bukan begitu, diceramahi udahlah, menurut saya pribadi enggak begitu, tapi dengan pendekatan lokal saya kira nanti lebih kena. Nanti saya berharap masukan juga pendekatan lokal dari Bapak-Ibu sekalian, dari Pimpinan maupun Anggota yang berkenaan dengan dapil, sehingga nanti NTT caranya dengan bahasa lokal. Bagaimana sirih, misalnya, berpengaruh enggak sih dengan *stunting* dengan pendekatannya? Apakah ibu hamil nyirih itu berpengaruh terhadap nanti kelahiran *stunting*? Contoh-contoh itu, nanti tentu ada hal yang berbeda.

Maksud saya, Bapak-Ibu sekalian, data nanti kita buka semua. Tolong nanti staf, teman-teman, siapa pun yang minta dari Bapak Anggota Dewan, tolong dikasih datanya, sehingga nanti bisa dicek di lapangan dan bareng-bareng, karena ini khusus terbuka, bukan rahasia negara. Kecuali data yang KRS, tentu tidak semua kita buka, karena nanti terjadi penyalahgunaan. Kita kunci, kecuali yang minta memang Bapak-Ibu maupun *stakeholder* terkait, karena KRS ini bagian dari pemutakhiran data.

Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, ini umum aja, ya. Izin, Pimpinan, ya. Yang kedua, tentu tentang integrasi, ya ini penting. Memang selama ini kalau tidak ada integrasi, tidak kolaborasi, memang tidak jalan, tetapi saya ulang-ulang, memang silakan kalau Bapak bisa kerjakan, kerjakan, tapi kalau enggak bisa selesaikan, ya saya selesaikan, tapi tolong teman-teman juga ikut terlibat. Contoh, perpres, Perpres 72 ketika saya masuk sudah berjalan terlalu jauh. Kemudian, saya ajak diskusi, saya ajak berdebat kementerian terkait, termasuk Bappenas. Ini logikanya, ini caranya, enggak bisa disimpulkan begitu. Setelah perjalanan jauh, *alhamdulillah*, sekarang sudah, *insyaAllah*, di tangan Bappenas untuk direvisi tentang *frame*, sehingga *work*-nya nanti jelas.

Bapak-Ibu, kemarin 22 kementerian. Jadi, ya, saya sampaikan ke *stakeholder* terkait, enggak bisa kerja begini, nanti enggak kelihatan, harus jelas kementerian apa, kerjanya apa, di mana, bersama siapa, lokusnya siapa, namanya siapa, biar jelas ini negara. Harapan saya, perpres, *insyaAllah*, nanti ada hubungan dengan Satgas *Stunting*, karena *ending*-nya nanti pembiayaan, maka ketika saya dijawab Satgas *Stunting* dilanjut belum ini, saya belum bisa menjawab, karena itu bagian dari pembiayaan yang dulu ada dalam pembiayaan Perpres 72 yang kita cuma 800 sekian, kementerian terkait T gitu, tapi enggak apa-apa. Saya tidak boleh menyalahkan. Saya harus bersinergi dan prinsipnya *welcome*, tetapi tentu nanti apa pun perintah dari Perpres 72, kelanjutan maupun penyempurnaan, kelihatannya pasti disempurnakan. *InsyaAllah*, juga dilanjutkan, cuma mungkin isinya, dalam tanda petik, pembiayaan kita ngikuti apa yang nanti diperintahkan oleh Bapak Presiden.

Tentu, secara teknis akan saya kerjakan, cuma saya tidak menunggu perpres, maka saya bikin Genting, dengan tadi, Pak, masukan dari beliau tadi, betul, 82% orang Indonesia paling dermawan nomor satu sedunia dan 62%-nya, Pak, dari itu membantu orang yang tidak dikenal. Nah, itu membantu orang yang tidak dikenal 62%-nya, maka saya bikin Genting itu, Pak. *Alhamdulillah*, Pak, ada orang Jakarta bantu yang di Sulawesi Tenggara, yang penting saya siapkan data, ini datanya, ini namanya, ini kecamatannya, silakan pilih berapa orang. Satu orang, menyelamatkan satu orang sama dengan satu generasi menurut saya. Ada yang dari mana ke Jawa Barat, ada yang ke NTT, enggak apa-apa, kita *welcome* kepada semuanya. Bapak-Ibu, itu persoalan Genting.

Kemudian persoalan untuk GATE dan istilah-istilah, sama, Pak, saya pertama kali belajar di kementerian ini istilahnya banyak betul, sampai ada keputusan menteri tentang singkatan. Ya sudah, enggak apa-apa, saya ikuti, yang penting substansinya nanti dapat, karena *ending*-nya adalah *outcome*. *Output yes, outcome* lebih penting, karena memang ini kementerian baru, yang saya kira, ya harus kelihatan kasat mata apa hasil dari kinerja.

Termasuk tadi masukan tentang orang tua, mohon maaf, Gerakan Orang Tua Teladan, coba saya renungkan, tapi prinsipnya kemarin begini, *reasoning*-nya itu ada *Hello Kitty Generation*, ada *Strawberry Generation*. Ibu luar biasa sangat berpengaruh terhadap *leadership* anak pada hari ini, karena banyaknya ayah meninggalkan anak, hanya memberikan rezeki dan keuangan tapi tidak ada sentuhan psikologi. Itu bukan saya yang bicara, tapi UNICEF, 20,9%. Karena itu, kita renungannya, walaupun kita berat, tapi ya sudah kita coba kerjakan. Bahwa ini hubungannya bukan masalah psikologis, ini hubungannya nanti di bonus demografi umur 14 tahun sampai 65 tahun. Kalau milenial ini sekarang misalnya umur 10 sampai 18 tahun, 20 tahun lagi menjadi generasi kita. Kalau jadi *Hello Kitty* ataupun jadi *Strawberry Generation* agak lumayan mengganggu nanti, menurut saya.

Ya, kalau di TikTok-TikTok mungkin Bapak-Ibu, mohon maaf, kalau nanti salah, saya diluruskan. Kesenggol pintu aja sambatnya bukan main. Bukan zaman Bapak-Ibu, zaman kita, mau kena dikit aja aman-aman saja, petarung kita ini, tapi nanti bisa diskusikan, Bapak. Artinya saya, saya renungkan, *insyaAllah*, prinsip setuju, karena Orang Tua Teladan ini juga penting dan nanti targetnya juga harus jelas, *outcome*-nya seperti apa.

Kemudian yang khusus apa itu SuperApps. Begini, Bapak-Ibu, nanti kita ada *dashboard* khusus, semuanya dalam satu *dashboard* biar kita enggak tumpang tindih. Saya juga sudah koordinasi dengan Menteri Komdigi, itu tentang bagaimana pengintegrasian, termasuk ini nanti contoh-contohnya *metaverse* untuk mempermudah sosialisasi. Boleh, saya kira, nanti Bapak-Ibu kalau mau ada dalam tokoh di sini, saya kira untuk *support* kita, masuk dalam bentuk *metaverse* di dapil masing-masing. Saya kira, bisa sosialisasi dengan Bapak-Ibu seakan-akan hidup dalam sosialisasi di *metaverse*.

Ini saya kira nanti bisa dikoordinasikan, Bapak-Ibu, sehingga kita bisa menjelaskan dan bisa melihat seperti apa nanti hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan *digital*. Saya ulangi, kebutuhan digital yang tentu semangatnya adalah bagaimana penerima manfaat *digital* itu kena atau dapat, karena mungkin masyarakat tertentu ataupun daerah tertentu semuanya tidak melek, tapi dengan bahasa yang sederhana, saya kok meyakini nanti kena. Sosialisasi, termasuk mohon maaf, tadi pendidikan seks, termasuk bagaimana kaum milenial, bagaimana yang tadi disebut, bagaimana kita belum hadir. Saya kira, dengan layanan ini, nanti *insyaAllah* sangat berpengaruh terhadap terutama kelompok milenial, AI nya gimana AI nya. Bapak-Ibu, *reasoning*-nya ini berawal dari hari ini banyak milenial itu hobinya, mohon maaf, nanti bisa didebatkan, didiskusikan, ya, banyak yang rebahan, kenapa? Karena semuanya diselesaikan dengan teknologi. Garap PR itu cukup AI ketik, klik-klik, semua sudah ada jawabannya, AI sudah menjawab.

Nah, harapannya nanti juga gitu. Kita konsultasi itu klik-klik sudah dijawab untuk *counter issue*, tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Maksud saya begini, nanti bias gender, ini bias milenial enggak. Milenial hari ini itu punya *state of the*, punya *novelty*, punya *out of the box*, pikirannya luar biasa dan saya berusaha untuk mengikuti bagaimana dengan pendekatan digital buat anak-anak milenial dan *it's ok*. Kalau enggak kita perhatikan, kita yang ditinggal nanti.

Termasuk yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan psikologis, mohon maaf, Bapak-Ibu, ini sederhana tapi perlu saya sampaikan. Butuhnya ngobrol sama anak-anak hari ini penting, mohon maaf, karena mereka lebih banyak ngobrol dengan medsos daripada kita. Itu generasi milenial kita, jangan pernah menyalahkan anak milenial, beliau rindu sebenarnya ngobrol sama orang tuanya. Fisik datang, Bu, kadang-kadang makan bersama hadir Bapak-Ibu, tapi memegang *handphone* sendiri-sendiri, mohon maaf, ya. Ini anu aja, diskusi, tapi ini serius, suatu saat ini akan agak bermasalah kalau enggak kita perhatikan. Saya

kira, inilah tugas kementerian kita, bagian dari siklus kehidupan yang untuk menjadi generasi emas tahun 2045. Sepuluh menit lagi.

Kemudian tentang Elsimil, masih ada, Pak. Elsimil kita masih kerja sama. Karena itu kemarin pas saya kegiatan di Jogja pernikahan massal, dipastikan Elsimilnya juga harus jelas. Elektronik siap nikah, siap hamilnya, biar nanti memastikan tidak ada masalah di kemudian hari....

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Iya, Pak Menteri. Bisa dipersingkat, Pak Menteri.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Oke.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Nanti yang lain jawab tertulis saja. Ya, oke.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Yang inti-intinya, saya kira, sinergi dan kolaborasi. Tentu itu masukan buat kita, Bapak-Ibu. Terus data terakhir dari Ibu, dari ini, nanti coba saya renungkan dari mana, Ibu, yang paguyuban itu, tapi sejarahnya boleh saya ceritakan dikit, ya. Sejarahnya ini kan sejarah dulu mau mendaftar kuotanya enggak ada. Akhirnya yang dibuka kuota di daerah tertentu, kemudian diterima. Nah, kira-kira gitu. Contoh, ya, misalnya di Jawa Tengah enggak ada kuota, adanya di NTT. Kemudian daftarlah di NTT dan diterima di NTT, sekarang mau balik lagi. Nah, saya mau merenungkan dulu. Artinya, nanti antara kebutuhan, dulu seperti apa, biar saya tidak salah, gitu. Kira-kira, sih, saya sudah ketemu, Pak. Ini saya sudah ketemu, cuma terima kasih aspirasinya, tentu, akan saya perhatikan. Saya memahami suasana kebatinan ini, seandainya kita jadi beliau-beliau, saya kira, sih.

Yang terakhir, Bapak-Ibu, yang berkenaan dengan anggaran, kemudian BPJS, saya setuju, Bu. Nanti kita programkan bersama. Saya mohon *support*-nya ini, minimal orang-orang lapangan ini dapat BPJS Ketenagakerjaan. Nah, paling 12.500, kemarin kita hitung butuhnya berapa?

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

16.800.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

16.800, satu koma sekian T.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Iya.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Saya sudah hitung.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Oh, sudah hitung.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Saya sudah hitung dari jumlah TPK dikurangi bidan dan perawat yang sudah PNS. Kan ada 200 sekian ribu, plus pos PKB, sudah saya hitung semua itu kebutuhannya berapa, sekitar satu koma dikit, lah. Izinkan saya mencari jalan keluarnya. Saya termasuk yang setuju. *Wong* Pak RT aja kita kasih tenaga BPJS Ketenagakerjaan, masa ini yang operasionalnya 210.000 enggak kita pikirkan, kita zalim juga, kan.

Saya kira itu, Bapak-Ibu sekalian. Banyak sekali tadi masukan-masukan. Prinsipnya, saya terima kasih dari masukan Bapak-Ibu sekalian, tentu itu menjadi *support* bagi kami, Bapak-Ibu Pimpinan, *support* bagi kami yang memang *problem*-nya kompleks harus kita urus tapi tidak kelihatan dengan cepat. Jadi, ngurusnya harus pelan-pelan, hati-hati, tapi dengan bahasa-bahasa yang pas. Kalau enggak pas, nanti bahasanya juga mungkin kurang enak. Misalnya, tentang *childfree*, tentang. Ya, saya kira menjadi isu-isu sekarang hari ini kita mesti hati-hati, termasuk saya setuju kita perhatikan juga walaupun ini baru isu, saya setuju, Bu. Untuk *childfree*, walaupun isu, penting. Kenapa saya bikin *daycare*? Tadi salah satunya itu. Termasuk angka kerja perempuan, kenapa? Salah satunya saya enggak mau kerja, anaknya nanti gimana ya, maka *daycare* salah satu menurut indikator kita, solusi yang nanti ibu-ibu, dalam tanda petik, bisa-bisa bekerja di sektor lain, walaupun tentu tidak akan meninggalkan anak-anaknya.

Saya kira itu, Bapak-Ibu sekalian. Masih banyak yang perlu saya jelaskan, tapi *insyaAllah* saya jawab secara tertulis. Masukannya saya terima kasih dengan senang hati dan saya minta para deputi-deputi nanti kalau ada giat-giat bisa melibatkan beliau-beliau, karena saya kira ini menjadi kewajiban kita di kementerian.

Terima kasih. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas masukannya.

Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Pimpinan. Silakan.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Pak Menteri yang sudah memberikan respon secara baik mengenai pertanyaan-pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan oleh para Anggota, terutama dalam mengintegrasikan teknologi IT ke dalam pelaksanaan program Mendukbangga.

Untuk teman-teman yang berkeinginan untuk mendapatkan informasi mengenai Genting, nanti sudah ada *dashboard*-nya. Nanti bisa dicek atau bisa dikomunikasikan lebih lanjut.

Baik, masih ada?

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin, izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Pak Heru dulu. Pak Heru pakai *mic*, Pak Heru, pakai mik.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Izin. Terima kasih, Pimpinan.

Yang honor pramusaji yang di lapangan, yang turunan PLKB ke pramusaji itu ada. Coba dicek, karena kasihan PLKB dikit, terus turunan, ada di lapangan.

Matur nuwun, Pak Pimpinan.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN (Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):

Siap, sedikit aja. Lagi saya betul-betul data, karena nanti ada yang *double-double*, saya juga lagi data semuanya, Pak. Mohon waktu, ada enggak, tapi kita lagi pendataan juga, termasuk TPK.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Bu Netty, ada?

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Ya, sedikit, Pimpinan.

Saya khawatir *misleading* ini. Tadi saya dengar Pak Menteri menyebutkan *childfree* ini hanya isu. Maksudnya isu nih, enggak ada sebetulnya atau isu apa, Pak? Kalau yang saya cermati kan sebetulnya memang ini jadi fenomena sosial. Maksud saya, jangan sampai dianggap remeh ya, gerakan *childfree* ini.

Ya, terima kasih.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN (Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):

Izin.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih Bu Netty, ya.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN (Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):

Setuju, setuju, Bu Netty. Ini bukan masalah, bukan isu, mungkin kalimat saya tadi kalau salah. Ini fenomena keinginan, walaupun saya berpikiran belum tentu dikerjakan, tapi itu fenomena, negara harus hadir. Kementerian kita harus perhatikan, karena itu salah satu yang mesti kita kerjakan adalah tadi *daycare*, bagian dari menjawab isu itu, karena mereka rata-rata ada tiga sebab, ada ketakutan, ada pilihan karena budaya, ada menggeser kebahagiaan. Nanti bisa didiskusikan, tapi prinsip ini yang harus kita perhatikan. Ya, bahasa sederhananya, izin, lebih bahagia dengan boneka, lebih bahagia dengan hewan, gitu. Oke, tapi nanti didiskusikan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Iya, itu salah satu fenomena sosial nanti kita diskusikan lebih lanjut.

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIA, S.E., M.M.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Baik.

Bapak-Ibu dan Saudara-Saudara,

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIA, S.E., M.M.):

Izin, Pimpinan, sedikit.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Masih ada lagi?

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIA, S.E., M.M.):

Sedikit saja, setengah menit, saya tidak mau membahas apa pun, tapi saya hanya ingin memperkenalkan diri, karena ini baru pertama kali saya bertemu dengan beliau. Pak Wi, saya masuk ruangan ini langsung terkesima. Jadi, saya senang sekali rasanya Bapak *the right man, on the right person, on the right place*. Ini saya lihat wajah dari sini ini adalah wajah-wajah yang sangat komunikatif dan *good looking* untuk bisa membuat masyarakat kita kesadarannya akan perencanaan apapun itu bisa lebih baik, gitu.

Pak Wihaji, Ibu Ratu Ayu, Prof. Budi Setyono, beserta seluruh jajaran, Pak Deputi, Bapak-Ibu Deputi, saya Indah Kurnia, Pak. Fraksi saya PDI Perjuangan, daerah pemilihan saya Jawa Timur I, Surabaya dan Sidoarjo. Tiga periode saya di DPR RI Komisi saya XI, Pak, 15 tahun, tahun ini saya mendapat kehormatan untuk bergabung dengan Komisi IX. Banyak hal yang perlu saya pelajari dan dalami, tetapi saya tentu ingin *di-tanting*, *di-tanting* itu dibawa, Pak, apabila ada kegiatan di Surabaya dan Sidoarjo, saya Indah Kurnia, Pak.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Bu Indah

Saya perpanjang dulu 10 menit, ya, untuk kesimpulan, ya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kita masuk ke kesimpulan. Tolong ditayangkan drafnya. Nanti kita setuju dulu Anggota, baru dikomentari oleh pemerintah.

Pertama, draf kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Rabu, 19 Februari 2025.

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk memperjelas indikator keberhasilan dan sasaran program *quick win*, serta melakukan inovasi dalam pelaksanaannya agar dapat dijalankan dengan lebih efektif dan dapat mengukur dampak nyata, khususnya dalam penurunan *stunting* dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Saya minta respon dari Bapak-Ibu. Setuju ini? Setuju, ya? Ya, setuju.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait, guna menghindari tumpang tindih dan memastikan sinergi dalam program-program yang berkaitan dengan penurunan *stunting*, pembangunan keluarga, serta pemberdayaan remaja dan lansia.

Ini ada masukan dari Bapak-Ibu? Setuju, ya? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk meningkatkan penggunaan data yang lebih jelas dan berbasis hasil nyata dalam setiap program yang dijalankan, serta melakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk mengukur dampak langsung terhadap penurunan *stunting* dan perbaikan kualitas hidup keluarga Indonesia.

Bagaimana, Bapak-Ibu? Setuju, ya.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IX DPR RI mengusulkan agar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN memasukkan informasi tentang kesehatan reproduksi/kespro dan seksualitas dalam program SuperApps sebagai upaya untuk mendukung pembangunan keluarga yang sehat, dengan memberikan akses informasi yang tepat kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi, guna memperkuat

kesadaran mereka tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesejahteraan jangka panjang.

Setuju? Setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Yang kelima ini normatif, saya kira, seperti biasa.

5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI pada rapat kerja hari ini paling lambat tanggal 26 Februari 2025.

Setuju, ya? Iya.

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang minta respon atau komentar, serta persetujuan dari Pak Menteri Kemendukbangga.

Saya persilakan.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Saya kira tidak ada masalah.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Satu per satu, Pak Menteri.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Nomor satu, oke.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Setuju, ya.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Setuju.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Iya. Lanjut

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN (Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):

Nomor 2, oke. Setuju, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ya, nomor 3.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ BKKBN (Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):

Aman. Kita senang desak-desak.

Terima kasih, oke, Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Nomor 4.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN (Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):

Oke, setuju.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Nomor 5 setuju, saya kira, ya.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN (Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):

Siap.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Baik.

Terima kasih, Pak Menteri. Saya ketok, ya, lapsing kita setuju, ya? Iya.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Sebelum mengakhiri, kami minta *closing statement* dari Pak Menteri terkait dengan rapat hari ini.

Saya persilakan.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
(Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.):**

Sedikit saja. Yang pertama, terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Mohon doanya, mohon *support*-nya. Ini kementerian negara maju yang butuh *support* dari Bapak-Ibu sekalian sebagai mitra dari Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga. Khusus tadi contoh Surabaya tentang penurunan *stunting*, itu pembiayaannya luar biasa, Pak. Saya sudah bekerja dengan Surabaya, saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinasnya, butuh duitnya banyak, kalau diterapkan di Indonesia enggak cocok.

Prinsip, terima kasih, mohon *support*-nya, Bapak-Ibu sekalian, Pimpinan dan Anggota DPR Komisi IX. Kita *welcome* sekaligus ini menjadi semangat kami dari kementerian untuk bekerja, terus kolaborasi dan bersinergi. Saya kira itu.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Billahi taufiq wal hidayah,
Fastabiqul khairat,
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Menteri, yang sudah memberikan *closing statement*.

Bapak-Ibu dan Saudara-Saudara,

Sebagaimana biasa, sebelum rapat ini kita tutup, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.

(BERDOA)

Berdoa selesai.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat saya nyatakan resmi ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.04 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd

**Ida Nuryati, S.Sos., M.A.
NIP.197604011998032002**